



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja KKP Tahun 2026 yang terdiri atas:
- arah kebijakan, sasaran strategis, program, dan kegiatan, serta dukungan terhadap prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - alokasi anggaran per unit organisasi eselon I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - matriks Renja KKP Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - rincian program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Renja KKP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi unit organisasi eselon I untuk dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2026.
- KETIGA : Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit organisasi eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA digunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan rencana kerja.
- KELIMA : Pimpinan unit organisasi eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Renja KKP tahun 2026 melalui laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran setiap triwulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, DAN KEGIATAN,
SERTA DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

A. Arah Kebijakan

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan kelautan dan perikanan pada RKP Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui swasembada pangan berbasis sumber daya akuatik (*blue food*) dan swasembada garam serta mendorong transformasi ekonomi biru sebagai salah satu sumbu utama kemandirian bangsa. Kebijakan ini sejalan dengan tema RKP Tahun 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, yang merupakan penjabaran dari tema RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

RKP Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk mewujudkan (1) pertumbuhan tinggi berkelanjutan meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20-5,50 persen, peningkatan *Gross National Income* (GNI) per kapita hingga 5.550 USD, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi 37,14 persen dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ke angka 72,67; (2) penurunan kemiskinan meliputi penurunan tingkat kemiskinan ke 6,0-7,0 persen, kemiskinan ekstrem sebesar 0,5 persen, rasio gini sebesar 0,377-0,380, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,44-4,86 persen; (3) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditandai dengan kenaikan Indeks Modal Manusia ke angka 0,57, proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,5 persen. Selain itu, RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk mencapai Indikator Pembangunan Tahun 2026, Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 106-108.

Asta Cita merupakan visi dan misi utama yang menjadi pondasi arah pembangunan nasional dan diintegrasikan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2026 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2026–2045 dan RPJMN 2026–2029 terdiri atas: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim

industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sektor kelautan dan perikanan menjadi kontributor utama pada PN (2) terkait swasembada pangan dan ekonomi biru, PN (4) terkait pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dan pemuda, PN (5) khususnya hilirisasi dan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan PN (8) terkait penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, serta mendukung PN lainnya terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, vokasi dan produktivitas tenaga kerja, kemandirian desa, reformasi sistem jaminan sosial, serta reformasi hukum.

Sejalan dengan itu, arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagai pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut, yang diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

- 1) memperluas kawasan konservasi laut;
- 2) penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota;
- 3) pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
- 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut diimplementasikan melalui kegiatan yang merupakan:

1. Penugasan Yang Menjadi Program Prioritas Presiden:
 - a. Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional merupakan agenda strategis Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada garam nasional. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor garam yang selama ini menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menegaskan komitmen bahwa Indonesia tidak akan lagi melakukan impor garam konsumsi maupun industri pada akhir tahun 2027, sejalan dengan visi ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi nasional. Upaya tersebut dijalankan melalui tiga strategi utama, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, dan pemanfaatan teknologi pada lahan terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Sebagai pelaksana utama kebijakan ini, KKP berkomitmen memperkuat basis produksi garam rakyat melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan mutu yang sesuai dengan standar industri. Program revitalisasi dan pembangunan infrastruktur utama tambak dilaksanakan di berbagai wilayah untuk memastikan suplai air laut tetap terjaga sepanjang musim produksi. Selain itu, KKP juga berupaya menjalankan strategi ekstensifikasi dengan membuka lahan garam baru di lokasi prioritas, yaitu di Kabupaten Rote Ndao. KKP bersama Pemerintah Daerah Rote Ndao tengah mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) dengan total luas area tambak garam mencapai 10.764 hektare (ha), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026.

Namun demikian, untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan garam nasional yang mencapai 5 juta ton per tahun, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi saja belum cukup karena keduanya masih sangat tergantung pada cuaca. Oleh karena itu, diperlukan strategi berikutnya yaitu penerapan teknologi produksi yang unggul dan berkelanjutan. Teknologi ini harus mampu mengatasi kelemahan utama produksi tradisional, yakni ketergantungan pada musim kemarau dan rendahnya kualitas.

Dalam konteks pengadaan garam industri dengan kemurnian tinggi dan produksi sepanjang tahun, KKP mendorong adopsi teknologi pabrikan modern seperti *Seawater Reverse Osmosis* (SWRO) dan *Mechanical Vapour Recompression* (MVR) Evaporator. Penerapan teknologi ini sulit dilakukan oleh petambak garam rakyat karena memerlukan biaya tinggi. Oleh karena itu, KKP terus mendorong percepatan investasi sektor pergaraman melalui kemudahan perizinan, insentif, dan pembukaan kemitraan strategis antara pelaku usaha besar dan koperasi garam rakyat. Arah kebijakan ini bertujuan membangun rantai pasok garam nasional yang efisien dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Memasuki tahun 2026, KKP menargetkan K-SIGN tahap pertama dapat beroperasi dan menghasilkan garam berkualitas industri yang mampu mensubstitusi impor garam industri. Pada saat yang sama, produktivitas tambak garam rakyat ditingkatkan melalui penerapan teknologi percepatan penuaan air dan perbaikan manajemen lahan, yang memungkinkan waktu panen lebih cepat.

Upaya ini sekaligus mendukung prinsip pemberdayaan petambak sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong percepatan investasi sektor pergaraman melalui kemudahan perizinan, insentif, dan pembukaan kemitraan strategis antara pelaku usaha besar dan koperasi garam rakyat. Arah kebijakan ini bertujuan membangun rantai pasok garam nasional yang efisien dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

b. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Sejalan dengan upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir, KKP terus mendorong peningkatan kualitas hidup nelayan. Permukiman nelayan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar, sarana produksi

yang belum memadai, serta lemahnya kapasitas usaha masyarakat. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya produktivitas dan pendapatan nelayan, sehingga kemiskinan masih menjadi permasalahan yang menonjol di banyak kawasan pesisir.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, KKP melaksanakan program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai model pengembangan permukiman nelayan yang terpadu. Program ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas penangkapan dan pascapanen, perbaikan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, serta penguatan kelembagaan dan akses usaha bagi nelayan.

Pada tahun 2026, KKP berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan KNMP di lokasi-lokasi prioritas yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan secara nyata dan terukur melalui:

- 1) peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap dengan memperkuat fasilitas produksi dan pemasaran hasil tangkapan untuk meningkatkan pendapatan nelayan;
- 2) penguatan ekonomi dan kelembagaan nelayan dengan meningkatkan kapasitas usaha, akses permodalan, dan daya saing melalui pemberdayaan koperasi/kelembagaan nelayan; dan
- 3) dampak langsung pengurangan kemiskinan dengan memperbaiki kualitas hidup yang berkontribusi pada penurunan persentase kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem nelayan.

c. Pengembangan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS), *Modelling* Budi Daya Rumput Laut, dan Komoditas Unggulan Tematik Lainnya.

Pengembangan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS), *Modeling* budi daya rumput laut, dan komoditas unggulan tematik lainnya merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) dalam menindaklanjuti arahan kebijakan nasional, khususnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Program prioritas tersebut dirancang tidak hanya untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional, mendorong pemerataan ekonomi di kawasan pesisir, serta mempercepat terwujudnya ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian implementasi dari program tersebut, ditetapkan 2 (dua) tahapan pencapaian strategis yaitu pencapaian operasional kegiatan pada tahun 2026 dan transformasi sistem tata kelola mulai 2027 sampai dengan 2029. Pada tahun 2025-2026, fokus utama adalah membangun

pondasi teknis, administratif, dan sosial yang kokoh di bidang budi daya rumput laut, Direktorat Rumput Laut menargetkan pembentukan satu klaster potensial berbasis kawasan, yang dilengkapi sarana budidaya modern dan pusat perbanyakan bibit unggul melalui teknologi kultur jaringan, sebuah respons langsung terhadap kendala krusial berupa keterbatasan ketersediaan benih bermutu yang selama ini menghambat peningkatan produktivitas. Klaster ini tidak hanya menjadi model teknis, tetapi juga wahana pendampingan, edukasi pengelolaan usaha, dan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi kelompok pembudi daya setempat. Di sisi lain, BINS di Karawang akan beroperasi sebagai unit produksi sekaligus pusat transfer teknologi.

d. Revitalisasi Peralatan Laboratorium Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan jaminan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan, penting bagi KKP untuk memperbarui dan meningkatkan fasilitas laboratorium. Saat ini, terdapat 47 (empat puluh tujuh) laboratorium yang telah menggunakan peralatan yang tidak memadai dan mengalami kerusakan selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pengujian yang akurat dan efisien, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas produk serta kepercayaan konsumen.

Pada tahun 2026, KKP dalam hal ini Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berkomitmen untuk melakukan revitalisasi peralatan laboratorium guna menjamin kualitas dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan. Revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas laboratorium dalam melakukan pengujian dan analisis, sehingga mampu memenuhi standar nasional dan internasional. Dengan peralatan yang terkini, laboratorium dapat menyediakan hasil pengujian yang lebih cepat, akurat, dan terpercaya. Capaian yang diharapkan meliputi:

- 1) peningkatan kapasitas pengujian
setiap laboratorium akan mampu meningkatkan jumlah pengujian yang dilakukan dalam satu bulan.
- 2) pengurangan waktu pengujian
revitalisasi diharapkan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan laporan pengujian produk.
- 3) standarisasi sistem pengujian
laboratorium akan menerapkan standar pengujian yang konsisten, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) peningkatan kepercayaan pengguna jasa
hasil pengujian yang akurat dan tepat waktu, seperti yang diharapkan pengguna jasa.

2. Proyek Strategis Nasional (PSN):

- a. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan;

- b. Modernisasi Kapal Perikanan;
 - c. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura;
 - d. Pengembangan Budi Daya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) di Kabupaten Sumba Timur; dan
 - e. Pembangunan K-SIGN.
3. Proyek yang Dibiayai Dengan Menggunakan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri:
- a. Pinjaman Luar Negeri
 - 1) *Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port)-Agence Française de Développement (AFD)*;
 - 2) *Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase I-Islamic Development Bank (IsDB)*;
 - 3) *Sector Loan for Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase I-Japan International Cooperation Agency (JICA)*;
 - 4) *Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase II (Project Readiness Financing)-Asian Development Bank (ADB)*;
 - 5) *Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)-Asian Development Bank (ADB)*;
 - 6) *Ocean for Prosperity-Infrastructure for Coral Reef Areas-World Bank*; dan
 - 7) *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System-Spanyol*.
 - b. Hibah Luar Negeri
 - 1) *The Evidence Based and Sustainable Ocean Management in Indonesia Project In Support to Outer Ring Fishing Ports Development-AFD*; dan
 - 2) *Toward Sustainable and Conversion Free Aquaculture in South East Asia (TOSCA)-ADB*.
4. Proyek yang Dibiayai Dengan Menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN):
- a. pembangunan laboratorium acuan (*reference*) di Cilangkap, Jakarta Timur dan pembangunan laboratorium rujukan wilayah timur di Makassar;
 - b. penyediaan *fishing and navigation simulator* (tahap II) untuk menyediakan pendidikan kelautan dan perikanan yang berkualitas di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang;
 - c. penyediaan *fishing and navigation simulator* untuk meningkatkan efisiensi pelatihan awak kapal perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dan BPPP Bitung;
 - d. penyediaan *fishing and navigation simulator* dan *engine simulator* untuk meningkatkan kualitas awak kapal perikanan Indonesia di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

Selain itu, untuk memetakan, mengukur, dan memantau kegiatan prioritas lintas sektor terdapat penandaan anggaran (*tagging*) tematik diantaranya (1) pendidikan; (2) infrastruktur; (3) responsif gender; (4) upaya konvergensi penanganan stunting; (5) mitigasi perubahan iklim; (6) adaptasi perubahan iklim; (7) upaya konvergensi penanganan stunting; dan (8) kerjasama selatan-selatan dan triangular.

B. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Strategis Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target 2026
1	SS 1. Terlindunginya laut dan sumber dayanya serta menjaga kelestarian wilayah laut	1	Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (juta ha)	30,7
		2	Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut (%)	7
2	SS 2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil	3	PDB perikanan (triliun Rupiah)	626,04
		4	Volume produksi perikanan (juta ton)	25,84
		5	Volume produksi garam (juta ton)	2,5
		6	Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0 - 1) (indeks)	0,5
		7	Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir (%)	22,45
		8	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indeks)	83
		9	Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudi daya Ikan dan petambak garam yang terfasilitasi (lembaga)	16
3	SS 3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional	10	Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)	6,7
		11	Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	26,85
		12	Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	72
4	SS 4. Meningkatnya kualitas SDM kelautan dan perikanan	13	Indeks kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan (indeks)	72
5	SS 5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas	14	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	90,1

C. Program Tahun 2026

Program Tahun 2026 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun-tahun sebelumnya sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program priority*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/lembaga untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan dan *output* kegiatan yang mencerminkan *real work* atau konkret.

Nomenklatur program KKP tahun 2026 beserta sasaran program, indikator sasaran program, target, dan satuan sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Program Tahun 2026

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten dan/atau Tersertifikasi yang Tersempai di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	76	%
		02-Persentase Peningkatan Omzet pada Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya	52	%
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	01-Meningkatnya nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang Berdaya Saing	01-Nilai ekspor rumput laut	647	USD Juta
		02-Nilai ekspor produk perikanan lainnya	6,05	USD Miliar
		03-Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri	320,8	Rp Triliun
		04-Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas	5,5	%
	02-Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing	01-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	72	%
		02-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	72	%
		03-Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor	42	Negara

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah RI	71	%
		05-Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	72	%
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	01-Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	01-Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang efektif dikelola	19,1	Juta Ha
	02-Meningkatnya pengelolaan biota perairan terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix CITES</i>	01-Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix CITES</i> yang dikelola (kumulatif)	445	Spesies
	03-Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang Bersih	01-Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)	7	Lokasi
	04-Meningkatnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	01-Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (kumulatif)	3	Lokasi
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	01-Kesejahteraan nelayan meningkat	01-Nilai tukar nelayan	106-108	Indeks
	02-Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	01-Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	81	Indeks
	03-Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	01-Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	81	Indeks
		02-Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	91	Nilai

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		03-Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	>1	%
	04-Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	76	Indeks
	05-Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	93	Indeks
		02-Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	81	Indeks
	06-Tata kelola sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	01-Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman	≤80	%
	07-Meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan	01-Volume produksi Ikan	7,15	Juta Ton
		02-Volume produksi rumput laut	12,22	Juta Ton
		03-Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi)	103,50	Nilai
	08-Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	01-Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan Pemerintah Pusat (%)	16,98	%
		02-Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan Pemerintah Daerah (%)	36,59	%
		03-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	500.050.000	Rp.000

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Indeks kepatuhan pengendalian pemanfaatan ruang laut	7,5	Indeks
		05-Nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang Laut	60	Nilai
	09- Meningkatnya produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan	01-Volume produksi perikanan tangkap	6,47	Juta Ton
	10-Meningkatnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil	01-Kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang dikelola (kumulatif)	2	Kawasan
	11-Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam	01-Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)	102,25	Indeks
	12-Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	01-Produktivitas lahan garam rakyat	85	Ton/Ha
	13-Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	01-Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017)	35	%
	14-Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan	01-Nilai Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan	550	Rp. Miliar
	15-Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi nelayan	01-Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan	10	Lembaga
	16-Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam	01-Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya	3	Unit
	06-Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudidaya	01-Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya	3	Unit
	01-Tata kelola pemerintahan	01-Nilai RB General KKP	84,85	Nilai

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
WA-Program Dukungan Manajemen	yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	02-Indeks profesionalitas ASN lingkup KKP	82,5	Indeks
		03-Nilai keterbukaan informasi publik KKP	97,25	Nilai
		04-Nilai kinerja perencanaan anggaran KKP	82,75	Nilai
		05-Nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	78	Nilai
		06-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal	≤0,5	%
		07-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal	86	%
		08- Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal	77	Nilai
	02-PNBP BLU sektor KP meningkat	01-Persentase pencapaian target PNBP layanan BLU LPMUKP	97,2	%
		02-Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP	91	%
	03-Pengawasan intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah terhadap kinerja KKP	01-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan KKP	≤0,5	%
		02-Persentase implementasi reformasi birokrasi lingkup KKP	86,5	%
		03-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	86	%

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja pengawasan inspektorat jenderal	4,1	Indeks
	04-Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal	01-Nilai kapabilitas pengawasan inspektorat jenderal	3,61	Nilai
		02-Persentase implementasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup inspektorat jenderal	82	%
		03-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	86,5	Nilai
	05-Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel Ditjen Pengelolaan Kelautan	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK)	86,5	Nilai
	06-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budi Daya (DJPB)	86,5	Nilai
	07-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)	86,5	Nilai
	08-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)	86,5	Nilai
	09-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel pengelolaan perikanan tangkap	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT)	86,5	Nilai

Program	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	10-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	02-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)	86,5	Nilai
	11-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)	86,5	Nilai
	12-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (DJPRL)	86,5	Nilai

D. Kegiatan Tahun 2026

Kegiatan pada tahun 2026 sebanyak 52 (lima puluh dua) kegiatan. Nomenklatur kegiatan KKP pada tahun 2026 beserta sasaran, indikator, target, dan satuannya adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Tabel 3 Sasaran Kegiatan Tahun 2026
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
2375- Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya pelatihan kelautan dan perikanan yang kompeten	01-Persentase lulusan pelatihan kelautan dan perikanan kompeten yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	76	%
2376- Pendidikan Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	01-Persentase lulusan pendidikan kelautan dan perikanan kompeten yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	86	%
7020- Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan	01-Persentase kelompok pelaku usaha/pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang	13	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		ditingkatkan kelasnya		
7948- Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya penguatan standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Persentase sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang tersertifikasi kompetensi	80	%

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Tabel 4 Sasaran Kegiatan Tahun 2026
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
2357- Pemasaran, Akses, dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	01- Meningkatnya pangsa pasar produk olahan rumput laut	01-Proporsi ekspor produk olahan rumput laut	49,9	%
	02- Meningkatnya akses dan promosi kelautan dan perikanan di luar negeri	01-Pertumbuhan ekspor produk perikanan	6,64	%
	03- Meningkatnya kontribusi protein ikan dalam pemenuhan protein hewani	01-Kontribusi protein ikan terhadap sumber protein hewani	53,15	%
	04- Terkendalinya neraca perdagangan hasil perikanan	01-Proporsi nilai impor terhadap ekspor hasil perikanan	<20	%
	05-Tersedianya rekomendasi kebijakan pengembangan sektor kelautan dan perikanan berdasar preferensi konsumen	01-Persentase provinsi yang terpetakan preferensi konsumennya	100	%
2358- Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	01- Meningkatnya utilitas industri pengolahan produk kelautan dan perikanan	01-Persentase utilitas industri pengolahan produk kelautan dan perikanan	68,9	%
	02- Meningkatnya	01-Volume produksi olahan perikanan	3,83	Juta Ton

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	produksi olahan kelautan dan perikanan			
3989- Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	01-Persentase sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit pengolahan ikan skala UMKM dan menengah besar	70	%
		02-Jumlah sertifikat <i>hazard analysis critical control point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.100	Sertifikat
		04-Harmonisasi sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	42	Negara
		05-Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	71	%
		06-Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	70	%
		07-Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	75	%
		08-Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	75	%
		09-Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	72	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
5279- Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	01- Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang memenuhi standar pengujian	01-Persentase produk kelautan dan perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian	75	%
7010- Manajemen Mutu	01- Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	01-Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	70	%
		02-Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70	%
		03-Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	75	Nilai
		04-Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	75	Nilai
		05-Standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir	4	Nilai
		06-Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	8	Dokumen
7025- Pengelolaan Prasarana dan Sarana Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	01- Meningkatnya ketertelusuran dan logistik ikan	01-Persentase peningkatan pelaku usaha yang menerapkan sistem ketertelusuran produk perikanan	29,4	%
	02- Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana logistik	02-Persentase pemanfaatan prasarana sarana logistik	82	%
7026- Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil	01- Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	01-Nilai investasi kelautan dan perikanan	14,47	Rp Triliun

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
Kelautan dan Perikanan	02-Meningkatnya UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas	01-Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya	5,5	%

3. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 5 Sasaran Kegiatan Tahun 2026
Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
2362- Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	01-Meningkatnya penambahan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01-Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru	700.000	Ha
	02-Terwujudnya tata kelola kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01-Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	52	Nilai
		02-Lokasi karbon biru yang dikelola berbasis kinerja	1	Lokasi
		03-Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan	600.000	Ha
	03-Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	01-Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	90	Nilai
	04-Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	01-Nilai efektifitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES	68,95	Nilai
		02-Biota perairan yang dilakukan upaya perlindungan	25	Jenis
		03-Biota perairan yang dilakukan upaya pelestarian (kumulatif)	4	Jenis
		04-Biota perairan yang difasilitasi pemanfaatan secara berkelanjutan (kumulatif)	445	Spesies
	05-Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	01-Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan	80	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		berkelanjutan biota perairan		
4346- Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	01-Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (Kumulatif)	296	Ton
	02-Meningkatnya ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	01-Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	57	Nilai
		02-Kawasan pesisir dan pulau - pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim	2	Kawasan
	03-Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	01-Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	57	Nilai
		02-Kawasan ekosistem mangrove yang direhabilitasi	1	Kawasan

4. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Tabel 6 Sasaran Kegiatan Tahun 2026
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
2337- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	01-Pengelolaan awak kapal Perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan	01-Persentase pemenuhan dokumen awak kapal perikanan	15	%
		02-Petugas pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi	130	Orang
		03-Rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diterbitkan	3	Dokumen
		04-Persentase permohonan persetujuan pengadaan kapal perikanan	100	%
		05-Persentase mesin kapal bantuan yang	93	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		dimanfaatkan oleh masyarakat		
		06-Petugas ahli ukur kapal perikanan yang tersertifikasi	30	Orang
		07-Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan	20.000	Unit
		08-Standar permesinan kapal perikanan yang diterbitkan	1	Dokumen
		09-Persentase awak kapal perikanan yang terlindungi	11	%
		10-Kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan	1.400	Kapal
		11-Kapal perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	1.700	Unit
2338- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	01-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang optimal dan bertanggung jawab	01-Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme <i>Port State Measures Agreement</i> (PSMA)	79	%
		02-Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	80	%
		03-Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan	50	%
		04-Persentase pelaksanaan	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan <i>Fish Market</i> bertaraf internasional		
		05-Persentase pelaksanaan pembangunan/ pengembangan Pelabuhan Perikanan yang menerapkan konsep <i>Eco Fishing Port</i>	100	%
		06-Rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan berwawasan lingkungan	4	Dokumen
		07-Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum	30	%
		08-Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	80	%
		09-Persentase lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Perikanan	39	%
		10-Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	43	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		11-Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya	7,1	%
		12-Persentase operasional pembangunan SKPT	96	%
		13-Tingkat Penerapan PIT dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan	91	Nilai
		14-Persentase Pelabuhan Perikanan dengan tingkat kinerja baik	17	%
		15-Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi	110	Pelabuhan
2339- Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan	01-Pengelolaan perizinan bertanggung jawab dan sesuai ketentuan	01-Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	13.000	Alokasi Kapal
		02-Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	10.000	Dokumen
		03-Persentase rekomendasi hasil analisis	92	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti		
		04-Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3,3	Skala/Nilai
		05-Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	92	%
		06-Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	97	%
		07-Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100	%
2341- Pengelolaan Sumber Daya Ikan	01-Pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan	01-Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		02-Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan	75	%
		03-Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	86,5	Nilai
		04-Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	100	%
		05-Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan	100	%
		06-Persentase posisi/rekomendasi/ prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional	100	%
		07-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	81	%
		08-Persentase <i>harvest strategy</i> di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun	77	%
		09-Persentase pelaksanaan	82	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan		
		10-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas	84	%
		11-Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat	100	%
		12-Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun	100	%
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	01-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang operasi armada dan peningkatan prasarana dan sarana PSDKP	01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada serta pengembangan prasarana dan sarana PSDKP	100	%
	02-Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif	01-Indeks operasi pesawat patroli	95,25	Indeks
		02-Indeks operasi kapal pengawas	92,25	Indeks
		03-Indeks operasi speedboat pengawas	92,25	Indeks
		04-Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan	100	Indeks

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		05-Indeks kesiapan Awak Kapal Pengawas	80	Indeks
		06-Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan	77,5	%
		07-Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	100	Indeks
		08-Persentase armada pengawasan SDKP yang disupervisi perawatannya	83	%
	03-Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan	01-Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80	Indeks
		02-Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	60	%
		03-Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	60	%
		04-Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	40	Nilai
		05-Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	40	Nilai
		06-Nilai kualitas rancangan	100	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP		
		07-Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	100	Nilai
2351- Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	01-Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82	Indeks
		02-Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82	Indeks
		03-Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82	Indeks
		04-Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif	82	Indeks
	02- Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan	01-Persentase penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	81	%
	03- Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	01-Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	82	Indeks
		02-Indeks kualitas supervisi	76	Indeks

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan		
		03-Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain	72	Indeks
		04-Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan	100	%
		05-Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang dipantau	100	%
		06-Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan penegakkan hukum kelautan dan perikanan	76	Nilai
		07-Persentase permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	70	%
	04-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	100	%
2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	01-Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83	Nilai
		02-Nilai kualitas supervisi	86	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		pengawasan sumber daya kelautan		
		03-Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan	81	Nilai
	02-Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	01-Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPPNRI	100	%
		02-Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan	83	Indeks
	03-Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	01-Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	Nilai
		02-Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	76	Nilai
		03-Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	Nilai
		04-Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	76	Nilai
	04-Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	01-Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	81	Nilai
		02-Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83	Nilai
		03-Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	86	Nilai
	06-Terselenggaranya	01-Persentase penyelesaian	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	penyusunan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		
2353- Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan secara efektif	01-Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan	81	Nilai
		02-Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat perikanan	81	Nilai
	02- Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	01-Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83	Indeks
		02-Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	83	Indeks
		03-Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas	100	%
	03- Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif	01-Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	%
		02-Persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	86	%
2363- Pengelolaan	01-Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan	01-Korporasi petambak garam yang	3	Lembaga

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
Sumber Daya Kelautan	ekonomi petambak garam	dikembangkan (kumulatif)		
	02-Meningkatnya kompetensi petambak garam	01-Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya	100	Orang
	03-Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi	01-Luas lahan garam yang direvitalisasi	1.500	Ha
	04-Meningkatnya pengembangan kawasan sentra ekonomi garam	01-Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kumulatif)	1	Kawasan
	05-Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan	01-Volume pengelolaan hasil sedimentasi	500	Juta m ³
		02-Kawasan BMKT yang dikelola	1	Kawasan
		03-Unit bisnias biofarmakologi yang dikembangkan	1	Unit Bisnis
	06-Meningkatnya perizinan berusaha sumber daya kelautan	01-Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan	100	%
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	01-Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi	1	Lokasi
		02-Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya	1	Lokasi
	02-Meningkatnya ekonomi masyarakat di wilayah pesisir, adat dan lokal	01-Kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya	2	Komunitas

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	03-Meningkatnya penertiban perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	01-Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan	5	Dokumen
7021- Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	01-Terkelolanya sistem budi daya rumput laut	01-Jumlah sarana/kawasan budi daya rumput laut yang dikembangkan dan disalurkan ke masyarakat	200	Unit
		02-Jumlah kawasan budi daya rumput laut yang dibangun dan direvitalisasi	1	Unit
		03-Jumlah bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	62.231	Unit
		04-Jumlah unit budi daya rumput laut yang dibina penerapan sertifikasinya	20	Unit
		05-Jumlah kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut yang disusun	3	Rekomend asi Kebijakan
		06-Jumlah Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut " <i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i> "	1	Unit
7022- Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	01-Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air payau	01-Jumlah bantuan calon induk unggul dan benih ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat	110.611.709	Ekor
		02-Jumlah calon induk unggul/benih	88.818.870	Unit

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		ikan/udang dan atau ikan konsumsi air payau yang diproduksi UPT		
		03-Jumlah pakan ikan air payau yang diproduksi untuk operasional UPT	106.102	Unit
		04-Jumlah sampel ikan air payau/pakan ikan/obat ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	9.421	Sampel
		05-Jumlah kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air payau yang disusun	3	Rekomendasi Kebijakan
		06-Jumlah sampel monitoring residu, monitoring penyakit ikan, <i>surveillance</i> AMU/AMR ikan air payau yang diuji	1.270	Sampel
		07-Jumlah infrastruktur budi daya udang yang dibangun	7	Unit
		08-Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	380	Unit
		09- Jumlah Budi Daya Udang Terintegrasi-ISF yang dibangun	1	Unit

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		10-Jumlah Klaster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dibangun	1	Unit
		11-Jumlah Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun	4	Unit
7023- Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	01-Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	01-Jumlah produksi calon induk unggul/ benih ikan/benih kepiting/ikan konsumsi air laut di UPT	1.151.752	Unit
		02-Jumlah benih ikan laut dan kepiting yang disalurkan ke masyarakat	5.009.127	Ekor
		03-Jumlah sampel ikan air laut dan nutrisi pakan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1.842	Sampel
		04-Jumlah kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut yang disusun	3	Rekomendasi Kebijakan
		05-Jumlah sampel monitoring penyakit ikan air laut dan <i>surveillance</i> AMU/AMR yang diuji	556	Sampel
		06-Jumlah kawasan budi daya ikan air laut/kepiting yang dibangun atau direvitalisasi	1	Unit

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		07-Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	200	Unit
7024- Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	01-Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air tawar	01-Jumlah produksi calon induk unggul/ benih ikan/ikan konsumsi air tawar di UPT	3.254.925	Unit
		02-Jumlah calon induk unggul/benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat	69.730.072	Ekor
		03-Jumlah sampel ikan air tawar, pakan dan obat ikan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	2.342	Sampel
		04-Jumlah perikanan budi daya yang berkelanjutan dan bebas konversi	1	Unit
		05-Jumlah kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air tawar yang disusun	3	Rekomendasi Kebijakan
		06-Jumlah peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	15	Unit
		07-Jumlah sampel monitoring residu, monitoring penyakit ikan dan <i>surveillance</i>	1.379	Sampel

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		AMU/AMR yang diuji		
		08-Jumlah prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar yang dibangun atau direhabilitasi	1	Unit
		09-Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	380	Unit
		10-Jumlah pakan ikan air tawar yang diproduksi untuk operasional UPT	107.122	Unit
7940- Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	01-Pengelolaan kenelayanan yang berdaya saing	01-Persentase kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya	50	%
		02-Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan	5.000	Orang
		03-Persentase nelayan yang terlindungi	100	%
		04-Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya	250	Lokasi
		05-05-Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya	100	%
	02-Pemberdayaan kelembagaan ekonomi nelayan melalui fasilitas	01-Kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan	10	Lembaga

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	penguatan usaha			
7941- Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	01-Terkelolanya sistem prasarana dan sarana perikanan budi daya	01-Jumlah peralatan/sarana perikanan budi daya yang disalurkan ke masyarakat	502	Unit
		02-Jumlah pengelolaan saluran irigasi perikanan yang disalurkan ke masyarakat	30	Unit
		03-Jumlah prasarana produksi perikanan budi daya di UPT yang dibangun atau direhabilitasi	1	Unit
		04-Jumlah unit produsen pakan dan obat yang dibina	20	Lembaga
		06-Jumlah kebijakan tata kelola bidang prasarana dan sarana budi daya yang disusun	3	Rekomendasi Kebijakan
	02-Peningkatan Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi)	01-Jumlah rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan disertifikasi	1.000	Orang
		02-Jumlah pembudi daya skala kecil yang terlindungi usahanya	375	Orang
	03-Pemberdayaan kelembagaan ekonomi pembudi daya melalui fasilitasi penguatan usaha	01-Jumlah Korporasi Pembudi daya ikan yang dikembangkan	3	Kelompok Masyarakat
7942- Pengelolaan Jasa Bahari	01-Meningkatnya pemanfaatan jasa bahari berkelanjutan	01-Lokasi pemanfaatan bangunan dan instalasi laut	1	Lokasi

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		yang sudah tidak beroperasi		
		02-Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (kumulatif)	1	Lokasi
		03-Kawasan wisata bahari yang dikelola	1	Kawasan
	02-Meningkatnya potensi karbon biru yang diperdagangkan	01-Persentase karbon biru yang Teregister dalam sistem registri nasional	100	%
	03-Meningkatnya perizinan berusaha jasa bahari	01-Persentase penyelesaian perizinan berusaha jasa bahari	100	%
7943-Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	01-Tersusunnya perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir	01-Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun	1	Dokumen
		02-Perairan laut antar wilayah yang Memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	2	Kawasan
		03-Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	4	kawasan

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	2	kawasan
	02-Terselenggaranya pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	01-Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	7	Provinsi
		02-Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci	4	Kawasan
7944- Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	01-Terselenggaranya pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut	01-Persentase penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut	100	%
		02-Persentase pemutakhiran data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut	100	%
		03-Persentase tata kelola layanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut	100	%
7945- Pembinaan Penataan Ruang Laut	01-Terwujudnya sinkronisasi dan pembinaan perencanaan ruang laut	01-Persentase sinkronisasi perencanaan ruang laut (kumulatif)	21,43	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		02-Persentase digitalisasi penataan ruang laut	40	%
		03-Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya	100	Orang
7946- Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01- Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang laut	01-Persentase penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut	100	%
		02-Persentase KKPRL yang dipantau dan dievaluasi	60	%
		03-Persentase penilaian laporan tahunan KKPRL	100	%
		04-Rencana tata ruang laut/rencana zonasi yang dinilai perwujudannya	12	Lokasi
		05-Lokasi pemanfaatan ruang laut yang belum memiliki izin dan berpotensi menjadi sumber PNB	17	Lokasi
		06-Persentase rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif	60	%

5. Program Dukungan Manajemen

Tabel 7 Sasaran Kegiatan Tahun 2026
Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
2322-Legislati, Litigasi, dan Kerja Sama	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan	01-Indeks reformasi hukum KKP	87	Indeks

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	akuntabel di bidang penyiapan produk hukum KKP	02-Indeks kualitas kebijakan KKP	85	Indeks
		03-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	100	%
		04- Persentase Permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangani	100	%
		05- Persentase Permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/ nonlitigasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangani	100	%
		06-Persentase perjanjian nasional bidang kelautan dan perikanan yang siap untuk ditandatangani	100	%
		07-Persentase instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum	100	%
		08-Nilai kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian	92,5	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Kelautan dan Perikanan		
	02-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerjasama antarlembaga	01-Persentase kontribusi kerja sama bidang KP terhadap program prioritas	87.25	%
	03-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	01-Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95	%
		02-Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	89	%
		03-Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	94	%
		04-Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100	%
2323-Pengelolaan Organisasi dan SDM	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan SDM aparatur dan organisasi	01-Nilai implementasi RB Setjen	86,5	Nilai
		02-Indeks sistem merit KKP	395	Indeks
		03-Indeks profesionalitas ASN Setjen	82,5	Indeks
		04-Indeks implementasi norma, standar, prosedur dan	86	Indeks

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		kriteria (NSPK) manajemen ASN		
		05-Indeks pembinaan JF KKP	73	Indeks
		06-Nilai kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi KKP	81	Nilai
		07-Persentase penyederhanaan struktur organisasi KKP	100	%
		08-Penetapan penghargaan ASN bidang kelautan dan perikanan tingkat nasional	5	Nilai
		09-Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi KKP	5	Nilai
		10-Indeks BerAKHLAK KKP	75	Indeks
		11-Persentase rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) daerah	83	%
		12-Indeks Kepuasan Pelayanan SDMA dan Organisasi	3	Indeks
		13-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Serta Standar Operasional Prosedur Lingkup Setjen	85	%
2325- Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dibidang pengelolaan program, anggaran, dan kinerja organisasi	01-Nilai SAKIP KKP	85,05	Nilai
		02-Persentase proyek PHLN KKP yang berstatus <i>at risk</i>	<58	%
		03-Persentase dokumen pendanaan luar	95,5	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		negeri KKP yang teregister		
		04-Capaian IKU KKP	76	Nilai
		05-Capaian prioritas nasional KKP	92	Nilai
		06-Nilai komponen penetapan tujuan pada maturitas SPIP KKP	1,8	Nilai
		07-Persentase pelaksanaan kegiatan lintas sektor	84	%
		08-Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP	92,3	Indeks
		09-Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal	87,2	Nilai
		10-Persentase peningkatan anggaran melalui pendanaan kolaboratif dan inovatif dalam rangka mendukung ekonomi biru	12	%
	02-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan, dan BMN	01-Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	Opini
		02-Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Level
		03-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	92	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,36	Indeks
		05-Indeks pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,05	Indeks
		06-Persentase Pengelolaan PNBP sektor kelautan dan perikanan	100	%
		07-Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Setjen	≤0,5	%
		08-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	86	%
		09-Nilai kinerja perencanaan anggaran Sekretariat Jenderal	81,75	Nilai
		10-Persentase implementasi standar biaya keluaran KKP	100	%
2328- Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, Umum, serta Pengadaan Barang dan Jasa	01-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan Komunikasi, dan Informasi Publik	01-Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	97,5	Indeks
		02-Nilai penilaian mandiri keterbukaan informasi publik KKP	97,25	Nilai
		03-Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada	95	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan		
		04-Nilai kepuasan terhadap layanan perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	91	Nilai
	02-Tata kelola pemerintah yang baik di bidang pengelolaan administrasi, dan ketatausahaan pimpinan	01-Tingkat digitalisasi arsip KKP	87	Nilai
		02-Nilai survei kepuasan masyarakat atas layanan protokoler dan ketatausahaan pimpinan	85,5	Nilai
		03-Nilai survei kepuasan masyarakat atas layanan kerumahtanggaan kantor pusat	85,5	Nilai
		04-Nilai pengawasan kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	81	Nilai
		05-Persentase pelaksanaan manajemen hemat energi KKP	76	%
	03-Tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan administrasi dan pengadaan barang/jasa	01-Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa KKP	85,5	Indeks
		02-Persentase rencana umum pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP	82	%
		03-Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	04-Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup level II Setjen	04-Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP	5	Nilai
		01-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Biro Umum	71,75	Nilai
		02-Nilai PM SAKIP Level II Setjen	87,2	Nilai
		03-Indeks Profesionalitas ASN Level II Setjen	82,5	Indeks
		04-Persentase penyelesaian temuan BPK Level II Setjen	100	%
		05-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II Setjen	86	%
		06-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri level II Setjen	100	%
		07-Persentase penyerapan anggaran level II Setjen	95	%
		08-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum	92,10	Nilai
		09-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP	92,10	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		10-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPISDKP	71,75	Nilai
		11-Persentase pelaksanaan rencana kerja zona integritas lingkup Biro Perencanaan	85	%
		12-Persentase pelaksanaan rencana kerja zona integritas lingkup Biro Hukum	80	%
		13-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BLU LPMUKP	71,75	Nilai
		14-Persentase penyerapan anggaran BLU LPMUKP	90	%
		15-Nilai kepuasan pelanggan pelayanan publik BPISDKP	90,5	Nilai
2329- Pengelolaan Data dan Informasi	01-Tata kelola pemerintahan Yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan data dan informasi kelautan dan perikanan	01-Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan	92	%
		02-Indeks layanan aplikasi sistem informasi	3,6	Indeks
		03-Persentase layanan sistem informasi pusat kontrol maritim	78	%
		04-Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3,3	Indeks
		05-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	78	Nilai
		06-Persentase pemenuhan data	92	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		citra satelit untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan		
		07-Persentase pemenuhan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan	100	%
		08-Tingkat kematangan keamanan siber KKP	2,1	Indeks
		09-Tingkat maturitas satu data kelautan dan perikanan	70	%
		10-Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE KKP	3	Nilai
		11-Tingkat Kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP	2,75	Nilai
		12-Indeks pelayanan publik KKP	4,65	Indeks
		13-Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP	88,9	Nilai
		14-Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	89,7	Nilai
2335- Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	01-Pengawasan intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah terhadap kinerja mitra	01-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan mitra Inspektorat	≤0,5	%
		02-Persentase implementasi reformasi birokrasi lingkup mitra Inspektorat	86,5	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		03-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat	86	%
		04-Jumlah rekomendasi kebijakan pengawasan kepada mitra Itjen KKP	18	Rekomendasi
		05-Nilai penilaian mandiri pembangunan integritas lingkup KKP	77	Nilai
		06-Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat lingkup KKP	100	%
	02-Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal	01-Nilai hasil telaah sejawat Inspektorat lingkup Inspektorat Jenderal	85,5	Nilai
		02-Persentase implementasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	82	%
		03-Tingkat kepatuhan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat Jenderal	100	%
2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	01-Manajemen kinerja Inspektorat Jenderal yang akuntabel	01- Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Inspektorat Jenderal	≤0,5	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		02-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal	86	%
		03-Indeks kepuasan mitra terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal	4,06	Indeks
		04- Penilaian mandiri SAKIP Inspektorat Jenderal	88,2	Nilai
		05- Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	88,5	Indeks
		06-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal	3,6	Nilai
		07- Persentase pemenuhan dukungan layanan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	100	%
		08- Persentase fasilitasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	82	%
		09-Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP Inspektorat Jenderal	77	%
		10-Nilai Penilaian mandiri pembangunan integritas	77	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		lingkup Inspektorat Jenderal		
		11-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal	92,10	Nilai
		12- Nilai kinerja perencanaan anggaran Inspektorat Jenderal	81,75	Nilai
		13- Persentase penyelesaian rancangan regulasi lingkup Inspektorat Jenderal	100	%
		14- Nilai pengawasan kearsipan internal Inspektorat Jenderal	81	Nilai
2342-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	01-Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	81,75	Nilai
		02-Indeks profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	84,5	Indeks
		03-Penilaian mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	88,2	Nilai
		04-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap	82	%
		05-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	3,6	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		06-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Ditjen Perikanan Tangkap	77	%
		07-Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap	82	%
		08-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen Perikanan Tangkap	90	%
		09-Persentase Pelaksanaan Kerja sama bidang Perikanan Tangkap	83	%
		10-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	86	%
		11-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	≤ 0,5	%
		12-Nilai survei Kepuasan masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap	88,8	Nilai
		13-Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap	100	%
		14-Persentase penyelesaian program penyusunan	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang perikanan tangkap		
		15-Persentase penyelesaian masalah hukum	100	Nilai
		16-Nilai proposal inovasi pelayanan publik Ditjen Perikanan Tangkap	78	Nilai
		17-Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	81	Nilai
		18-Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	92,10	Nilai
		19-Nilai keterbukaan informasi publik Ditjen Perikanan Tangkap	92	Nilai
		20-Nilai pembangunan integritas Ditjen Perikanan Tangkap	81	Nilai
		21-Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap	66	%
2348-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	86	%
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan	≤0,5	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya		
		03-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	82	%
		04-Nilai pembangunan integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	77	Nilai
		05-Penilaian mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya	84,2	Nilai
		06-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	92,1	Nilai
		07-Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	81,75	Nilai
		08-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	3,6	Nilai
		09-Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	81,5	Indeks
		10-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen Perikanan Budi Daya	92	%
		11-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Menteri dan Keputusan Menteri di bidang perikanan budi daya		
		12-Nilai pengawasan kearsipan Ditjen Perikanan Budi Daya	81	Nilai
		13-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	77	%
		14-Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	66	%
		15-Nilai proposal inovasi pelayanan publik Ditjen Perikanan Budi Daya	78	Nilai
2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1.	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	86	%
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	≤0,5	%
		03-Penilaian mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88,2	Nilai
		04-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	92,1	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		05-Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP	81,75	Nilai
		06-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,6	Nilai
		07-Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81,5	Indeks
		08-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	%
		09-Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen PSDKP	81	Nilai
		10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Ditjen PSDKP	77	%
		11-Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100	%
		12-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya	86	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		telah dilengkapi dan disampaikan		
		13-Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,8	Nilai
		14-Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	Indeks
		15-Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	78	Nilai
		16-Nilai implementasi program budaya kerja	71	Nilai
		17-Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	61	Nilai
		18-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77	Nilai
		19-Indeks pelayanan publik Ditjen PSDKP	3,7	Indeks
		20-Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP Ditjen PSDKP	66	%
		21-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	80	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		22-Persentase implelementasi kerja sama	80	%
		23-Indeks efektivitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	Indeks
		23-Nilai pembangunan integritas	77	Nilai
		24-persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan SDKP	85	%
		25-Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	%
2361-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	86	%
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	≤0,5	%
		03-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategi s lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	82	%
		04-Nilai pembangunan integritas	77	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP		
		05-Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	86,2	Nilai
		06-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	92,1	Nilai
		07-Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	81,75	Nilai
		08-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	3,6	Nilai
		09-Indeks profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	81,5	Indeks
		10-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	100	%
		11-Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup	81	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Direktorat Jenderal PDSPKP		
		12-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	77	%
		13-Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 serta SOP lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	85	%
		14-Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	78	Nilai
		15-Tingkat kepatuhan pengelolaan data lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	97	%
		16-pemenuhan layanan perkantoran lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	12	Layanan
		17-Persentase penyelesaian permasalahan hukum lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	100	%
		18-Persentase dokumen kerja sama yang disusun/ditinda klanjuti oleh Direktorat Jenderal PDSPKP	80	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		19-Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	≤5	%
		20-Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	80	%
2367-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	01-Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan	81	%
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Ditjen Pengelolaan Kelautan	≤0,5	%
		03-Nilai pembangunan integritas DJPK	77	Nilai
		04-Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	82	%
		05-Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK	72	Nilai
		06-Indikator Kinerja Pelaksanaan	89,5	Nilai

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Anggaran (IKPA) Ditjen Pengelolaan Kelautan		
		07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK	81,75	Nilai
		08-Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK	3,6	Nilai
		09-Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK	66	%
		10-Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	81	Indeks
		11-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen Pengelolaan Kelautan	91	%
		12-Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK	78	Nilai
		13-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di bidang pengelolaan kelautan	100	%
		14-Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Pengelolaan Kelautan	81	Nilai
		15-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP	77	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Ditjen Pengelolaan Kelautan		
		16-Nilai keterbukaan informasi publik DJPk	92	Nilai
		17-Persentase pelaksanaan kerja sama bidang pengelolaan kelautan	100	%
2378-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	≤0,5	%
		02-Indeks profesionalitas ASN BPPSDMKP	81,5	Indeks
		03-Penilaian mandiri SAKIP BPPSDMKP	88,2	Nilai
		04-Nilai maturitas struktur dan proses SPIP BPPSDMKP	3,6	Nilai
		05-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	86	%
		06-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDMKP	92,1	Nilai
		07-Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPSDMKP	81,75	Nilai
		08-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		Menteri di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		
		09-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPSDMKP	81	Nilai
		10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP BPPSDMKP	77	%
		11-Nilai pembangunan integritas BPPSDMKP	77	Nilai
		12-Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP BPPSDMKP	85	%
		13-Nilai proposal inovasi pelayanan publik BPPSDMKP	78	Nilai
3987-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP	86	%
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP	≤0,5	%
		03-Persentase unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan BPPMHKP	5	Unit

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		04-Nilai PM SAKIP BPPMHKP	86,20	Nilai
		05-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP	92,1	Nilai
		06-Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPMHKP	81,75	Nilai
		07-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP BPPMHKP	3,6	Nilai
		08-Indeks profesionalitas ASN BPPMHKP	82,5	Indeks
		09-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	100	%
		10-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP	81	Nilai
		11-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP BPPMHKP	77	%
		12-Survei kepuasan masyarakat lingkup BPPMHKP	3,5	Indeks
		13-Nilai proposal inovasi pelayanan publik BPPMHKP	78	Nilai
4345- Pendidikan dan		01- Jumlah aparatur KKP	224	Orang

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan	01-Aparatur KKP yang dididik dan dilatih	yang diberikan tugas belajar		
		02-Jumlah aparatur KKP yang diberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur	4.620	Orang
6453-Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	01-Terkelolanya modal usaha kelautan dan perikanan	01-Realisasi PNBPN Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	31	Rp. Miliar
		02-Realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	80	Rp. Miliar
		03-Persentase hasil perhitungan capaian rasio dana bergulir diragukan tertagih	100	%
		04-Penyelesaian Modernisasi Badan layanan Umum (BLU)	82	Nilai
		05-Nilai kepuasan pemanfaatan atas layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	87	Nilai
		07-Persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan atau pendampingan usaha	82	%
7939-Analisis Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang analisis kebijakan strategis kelautan	01-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan lingkungan berkelanjutan	80	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	dan perikanan	yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan		
		02-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang produksi perikanan dan produk kelautan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	80	%
		03-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang swasembada garam yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	80	%
		04-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang peningkatan konsumsi dan penguatan pasar yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	80	%
		05-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang analisis dan evaluasi kebijakan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	80	%
7947-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	01-Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang	81	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
	Ditjen Penataan Ruang Laut	dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL		
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL	≤0,5	%
		03-Nilai pembangunan Integritas DJPRL	76	Nilai
		04-Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPRL	70	Nilai
		05-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran DJPRL	89,5	Nilai
		06-Nilai kinerja perencanaan anggaran DJPRL	81,75	Nilai
		07-Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL	3,6	Nilai
		08-Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPRL	65	%
		09-Indeks profesionalitas ASN DJPRL	81	Indeks
		10-Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL	91	%
		11-Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPRL	77	Nilai
		12-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di bidang penataan ruang laut	100	%

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
		13-Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL	75	Nilai
		14-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP DJPRL	77	Persen

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

ALOKASI ANGGARAN PER UNIT ORGANISASI ESELON I TAHUN 2026

A. ALOKASI ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA PER UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	JENIS BELANJA (Rp.000)				
		BELANJA OPERASIONAL			BELANJA NON OPERASIONAL	JUMLAH
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPS. PERKANTORAN	SUBJUMLAH		
1	SETJEN	110.390.941	222.388.686	332.779.627	307.781.336	640.560.963
2	ITJEN	41.126.165	2.931.698	44.057.863	54.820.830	98.878.693
3	DITJEN PT	269.909.943	123.599.620	393.509.563	5.863.120.040	6.256.629.603
4	DITJEN PB	234.572.709	100.263.655	334.836.364	821.033.034	1.155.869.398
5	DITJEN PSDKP	247.546.905	49.427.428	296.974.333	750.009.039	1.046.983.372
6	DITJEN PDSPKP	86.378.910	22.145.333	108.524.243	167.500.000	276.024.243
7	DITJEN PK	111.812.806	21.115.650	132.928.456	1.262.500.000	1.395.428.456
8	DITJEN PRL	50.000.000	10.000.000	60.000.000	139.960.342	199.960.342
9	BPPSDMKP	972.938.000	135.588.098	1.108.526.098	290.781.667	1.399.307.765
10	BPPMHKP	206.471.015	68.932.965	275.403.980	254.953.185	530.357.165
JUMLAH		2.331.147.394	756.393.133	3.087.540.527	9.912.459.473	13.000.000.000

B. ALOKASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM PER UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PROGRAM (Rp.000)					
		PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	DUKUNGAN MANAJEMEN	JUMLAH
1	SETJEN	-	-	-	-	640.560.963	640.560.963
2	ITJEN	-	-	-	-	98.878.693	98.878.693
3	DITJEN PT	5.834.085.040	-	-	-	422.544.563	6.256.629.603
4	DITJEN PB	797.966.934	-	-	-	357.902.464	1.155.869.398
5	DITJEN PSDKP	731.009.039	-	-	-	315.974.333	1.046.983.372
6	DITJEN PDSPKP	-	157.300.000	-	-	118.724.243	276.024.243
7	DITJEN PK	1.206.460.000	-	44.540.000	-	144.428.456	1.395.428.456
8	DITJEN PRL	103.610.342	-	-	-	96.350.000	199.960.342
9	BPPSDMKP	-	-	-	266.668.436	1.132.639.329	1.399.307.765
10	BPPMHKP	-	227.300.000	-	-	303.057.165	530.357.165
JUMLAH		8.673.131.355	384.600.000	44.540.000	266.668.436	3.631.060.209	13.000.000.000

C. ALOKASI ANGGARAN MENURUT SUMBER DANA PER UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	SUMBER DANA (Rp.000)						
		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN	JUMLAH
1	SETJEN	603.305.464	-	37.255.499	-	-	-	640.560.963
2	ITJEN	98.878.693	-	-	-	-	-	98.878.693
3	DITJEN PT	6.067.482.211	48.147.392	-	125.000.000	16.000.000	-	6.256.629.603
4	DITJEN PB	925.102.778	11.525.845	142.240.775	65.000.000	12.000.000	-	1.155.869.398
5	DITJEN PSDKP	1.036.983.372	-	-	10.000.000	-	-	1.046.983.372
6	DITJEN PDSPKP	276.024.243	-	-	-	-	-	276.024.243
7	DITJEN PK	1.365.428.456	-	-	30.000.000	-	-	1.395.428.456
8	DITJEN PRL	179.960.342	-	-	20.000.000	-	-	199.960.342
9	BPPSDMKP	1.310.507.329	-	38.046.404	-	-	50.754.032	1.399.307.765
10	BPPMHKP	477.903.980	15.253.185	-	-	-	37.200.000	530.357.165
JUMLAH		12.341.576.868	74.926.422	217.542.678	250.000.000	28.000.000	87.954.032	13.000.000.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
Kementerian Kelautan dan Perikanan			13.000.000.000
Sekretariat Jenderal (SETJEN)			640.560.963
032.01.WA.Program Dukungan Manajemen			640.560.963
2322.AEC.002.Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga	1	Kesepakatan	126.470
2322.EBA.Z01.Layanan Hukum	12	Layanan	6.700.220
2322.EBA.Z04.Layanan Bantuan Hukum Pegawai	25	Perkara	600.000
2322.EBA.Z05.Layanan Bantuan Hukum Institusi	20	Perkara	1.199.780
2322.PEC.001.Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	2	Kesepakatan	15.000.000
2323.EBA.Z08.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	781.200
2323.EBC.Z13.Layanan Manajemen SDM	15.490	Orang	12.422.582
2325.AEA.001.Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar Mitra dan Stakeholder KP	55	Kegiatan	33.342.369
2325.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	480.000
2325.EBD.Z23.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Layanan	809.710
2325.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7	Rekomendasi	664.280
2325.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2325.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan Satker Tugas Pembantuan	38	Layanan	696.420

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2328.BMB.001.Layanan Komunikasi Publik	3	Layanan	15.121.287
2328.CAN.001.Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Setjen	93	Unit	3.200.000
2328.EBA.959.Layanan Protokoler	2	Layanan	33.094.156
2328.EBA.962.Layanan Umum	61	Layanan	64.373.226
2328.EBA.994.Layanan Perkantoran	4	Layanan	312.094.876
2328.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	458.000
2328.EBB.951.Layanan Sarana Internal	60	Unit	19.103.649
2328.EBB.971.Layanan Prasarana Internal	1	Unit	23.361.669
2329.BMA.001.Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	42	Dokumen	16.777.299
2329.FAB.001.Sistem Informasi Pemerintahan	4	Sistem Informasi	23.883.540
2329.QMA.001.Layanan Data Kelautan dan Perikanan	160	Data	4.600.000
2329.RAN.001.Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	5.000.000
2329.RAN.002.Sarana Data Citra Satelit Radar	5	Unit	606.731
2329.RCL.001.OM Sarana Data Citra Satelit Radar	3	Unit	4.600.000
6453.BDG.001.UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	1.600	Umkm	8.678.986
6453.BIF.001.Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1	Layanan	1.181.134
6453.BMA.001.Layanan Teknologi Informasi LPMUKP	1	Dokumen	317.600
6453.CAN.001.Layanan Pengadaan Perangkat TIK	8	Unit	160.000
6453.EBA.962.Layanan Umum	1	Layanan	4.586.652
6453.EBA.994.Layanan Perkantoran	1	Layanan	20.684.751
6453.EBB.951.Layanan Sarana Internal	2	Unit	134.000
6453.FAE.001.Laporan Pengelolaan Keuangan	2	Laporan	746.502
6453.FAE.002.Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	1	Laporan	594.144
6453.FAE.003.Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	1	Laporan	171.730

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7939.ABW.G12.Analisa dan Rumusan Rekomendasi Strategis di Bidang Kelautan dan Perikanan	20	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
7939.AEA.151.Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Strategis di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Kegiatan	1.000.000
7939.AEA.152.Integrasi dan Sinergi Kebijakan Strategis di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Kegiatan	1.500.000
Inspektorat Jenderal (ITJEN)			98.878.693
032.02.WA.Program Dukungan Manajemen			98.878.693
2335.AAH.001.Peraturan Bidang Pengawasan Intern	10	Peraturan	365.000
2335.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Rekomendasi	204.000
2335.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2335.EBD.Z30.Layanan Audit Internal	439	Rekomendasi	43.380.111
2335.EBD.Z31.Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan	197.400
2335.EBD.Z33.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	120.200
2335.EBD.Z35.Layanan Manajemen Kinerja	1	Layanan	122.036
2336.CAN.001.Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	50	Unit	1.325.000
2336.EBA.962.Layanan Umum	1	Layanan	213.867
2336.EBA.994.Layanan Perkantoran	1	Layanan	44.057.863
2336.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	138.920
2336.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	120.192
2336.EBB.951.Layanan Sarana Internal	188	Unit	2.407.123
2336.EBC.996.Layanan Pendidikan dan Pelatihan	224	Orang	4.088.495
2336.EBC.Z13.Layanan Manajemen SDM	672	Orang	458.326
2336.FAB.001.Sistem Informasi Pengawasan	1	Sistem Informasi	1.172.160

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT)			6.256.629.603
032.03.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			5.834.085.040
2337.ABR.002.Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2337.ABR.003.Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
2337.ABR.004.Rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
2337.ACA.001.Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	1.000	Produk	3.900.000
2337.ADC.001.Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi	1	Produk	451.426
2337.BDC.001.Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	2	Orang	400.000
2337.BKB.001.Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	5	Laporan	500.000
2337.PCA.001.Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	500	Produk	500.000
2337.PCA.002.Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	10	Produk	500.000
2337.PDI.001.Awak kapal perikanan yang disertifikasi	500	Orang	500.000
2337.PDI.002.Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	12	Orang	500.000
2337.QDC.001.Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	1.000	Orang	500.000
2337.QEO.002.Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	45.000	Unit	60.085.750
2337.QEO.003.Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	7.500	Unit	461.414.250
2338.ABR.001.Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	2	Rekomendasi Kebijakan	739.648
2338.BGA.001.Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	74	Lembaga	540.000
2338.BGA.002.Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	31	Lembaga	28.460.966
2338.BGA.004.Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	74	Lembaga	500.000
2338.PDI.001.Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	50	Orang	500.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2338.PDI.002.Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	30	Orang	460.000
2338.QGA.001.Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	1	Lembaga	100.000
2338.QGA.002.Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	50	Lembaga	20.000.000
2338.RAL.001.Sarana penunjang pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang disediakan	9	Unit	200.000
2338.RBQ.001.Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1	Unit	500.000
2338.RBQ.003.Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	2	Unit	60.000.000
2338.RBQ.004.Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	4	Unit	76.000.000
2338.RBQ.005.Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1	Unit	200.000
2338.SCC.001.Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	50	Orang	33.000
2339.PBR.001.Rekomendasi Kebijakan usaha penangkapan ikan	6	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000
2339.PBR.002.Rekomendasi kebijakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan yang dilaksanakan	6	Rekomendasi Kebijakan	500.000
2339.PCA.001.Perizinan Berusaha (PB) perikanan tangkap yang dikelola	6.000	Produk	700.000
2339.PCA.002.Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU) perikanan tangkap yang dikelola	1.600	Produk	500.000
2339.QDC.001.Nelayan kecil dan pelaku usaha pemilik kapal berukuran di bawah 30 GT yang difasilitasi perizinan berusahnya	5.000	Orang	3.000.000
2339.QKB.001.Usaha Penangkapan Ikan yang dipantau, dianalisis dan dievaluasi	6	Laporan	1.000.000
2339.QMA.001.Sistem usaha perikanan tangkap yang terdigitalisasi dan terintegrasi	6	Data	700.000
2339.UBA.001.Pemerintah Daerah yang difasilitasi perizinan berusaha dan pungutan perikanan tangkap	37	Provinsi	1.200.000
2341.ABR.001.Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Perairan Darat	2	Rekomendasi Kebijakan	250.000
2341.ABR.002.Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2341.ABR.003.Rekomendasi kebijakan alokasi SDI	11	Rekomendasi Kebijakan	350.000
2341.PBR.001.Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	11	Rekomendasi Kebijakan	400.000
2341.PBR.002.Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	2	Rekomendasi Kebijakan	150.000
2341.PBR.003.Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	11	Rekomendasi Kebijakan	250.000
2341.QGA.001.Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	Lembaga	350.000
2341.QGA.004.Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaanya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	3	Lembaga	1.500.000
2341.RBQ.002.Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	1	Unit	100.000
7940.BDC.001.Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	2.500	Orang	1.000.000
7940.BDC.002.Awak kapal perikanan pelintas batas yang difasilitasi perlindungannya	50	Orang	200.000
7940.QDC.001.Nelayan yang difasilitasi sertifikasi bidang tanahnya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDC.002.Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDC.003.Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDD.001.Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	250	Kelompok Masyarakat	16.500.000
7940.QDD.004.Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (Korporasi)	1	Kelompok Masyarakat	200.000
7940.QDD.005.Koperasi nelayan yang difasilitasi tergabung dalam koperasi merah putih Kelautan dan Perikanan	250	Kelompok Masyarakat	6.250.000
7940.QEA.001.Bantuan Premi Asuransi Nelayan	275.000	Orang	61.600.000
7940.QEH.001.Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya	250	Kelompok Masyarakat	5.002.000.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7940.QEH.002.Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (Korporasi)	1	Kelompok Masyarakat	200.000
7940.QEH.005.Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	3	Kelompok Masyarakat	3.500.000
7940.QKA.001.Nelayan kecil yang dipantau pemberdayaan usahanya	200	Laporan	1.000.000
7940.QKA.002.Kelompok nelayan yang dipantau pemberdayaan usahanya	800	Laporan	1.000.000
7940.QKA.003.Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	10.000	Laporan	200.000
7940.QKA.004.Kelompok Nelayan yang diidentifikasi kampung nelayannya untuk difasilitasi penataannya	20	Laporan	200.000
7940.QMA.001.Data Nelayan yang teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan	100.000	Data	3.750.000
032.03.WA.Program Dukungan Manajemen			422.544.563
2342.AEA.001.Koordinasi Pengelolaan Manajerial	1	Kegiatan	4.028.726
2342.CAN.955.Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	Unit	997.720
2342.EBA.962.Layanan Umum	1	Layanan	94.056
2342.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.674.180
2342.EBA.994.Layanan Perkantoran	1	Layanan	393.509.563
2342.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	416.123
2342.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	218.525
2342.EBB.951.Layanan Sarana Internal	1	Unit	6.514.871
2342.EBB.971.Layanan Prasarana Internal	1	Unit	12.470.078
2342.EBC.Z13.Layanan Manajemen SDM	2.068	Orang	426.486
2342.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30	Rekomendasi	1.658.435
2342.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2342.EBD.Z33.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	27.800
Ditjen Perikanan Budi Daya (DJPB)			1.155.869.398
032.04.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			797.966.934

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7021.PBR.001.Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	3	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7021.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut	20	Lembaga	40.000
7021.QED.001.Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	62.231	Unit	4.500.000
7021.QEG.001.Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	200	Unit	10.000.000
7021.QEG.002.Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i>	1	Unit	5.000.000
7021.RBQ.002.Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun	1	Unit	10.000.000
7022.BJC.001.Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau	9.234	Sampel	3.693.590
7022.BJC.002.Sampel Uji Pakan dan Obat Ikan Air Payau	187	Sampel	131.170
7022.PBR.001.Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	3	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7022.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	380	Lembaga	760.000
7022.QEL.U01.Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	204	Ekor	22.236
7022.QEL.U02.Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	19.162	Ekor	1.124.837
7022.QEL.U03.Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	7.619.248	Ekor	1.904.812
7022.QEL.U04.Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	102.973.095	Ekor	5.456.471
7022.QJC.001.Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji	480	Sampel	1.200.000
7022.QJC.002.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji	255	Sampel	510.000
7022.QJC.U03.Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji	535	Sampel	502.856
7022.RAL.001.Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	4.042	Unit	412.328
7022.RAL.002.Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi	141.198	Unit	8.189.502
7022.RAL.003.Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	106.102	Unit	1.538.482
7022.RAL.004.Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	32.339.991	Unit	7.276.498
7022.RAL.005.Benih Udang yang Diproduksi	52.450.560	Unit	2.622.528
7022.RAL.006.Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi	3.883.078	Unit	112.609.254

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7022.RBQ.003. <i>Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project</i> (IISAP)	7	Unit	60.000.000
7022.RBQ.005.Budidaya Udang Terintegrasi - ISF	1	Unit	10.000.000
7022.RBQ.006.Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan	1	Unit	300.000.000
7022.RBQ.007.Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun	4	Unit	10.000.000
7023.ABR.001.Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	3	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7023.BJC.001.Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut	1.842	Sampel	736.800
7023.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	200	Lembaga	400.000
7023.QEL.U03.Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	448.658	Ekor	460.772
7023.QEL.U04.Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	4.560.469	Ekor	27.932.871
7023.QJC.001.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	340	Sampel	680.000
7023.QJC.U02.Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	216	Sampel	203.343
7023.RAL.001.Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	5.747	Unit	811.348
7023.RAL.002.Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	5.612	Unit	1.840.635
7023.RAL.004.Benih Kepiting yang diproduksi	341.622	Unit	341.622
7023.RAL.005.Benih Ikan Laut yang diproduksi	773.771	Unit	4.642.622
7023.RAL.006.Ikan Konsumsi air laut hasil budi daya yang diproduksi	25.000	Unit	3.750.000
7023.RBQ.001.Kluster Komoditas Unggulan Air Laut berbasis kawasan	1	Unit	250.000
7024.ABR.001.Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	3	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7024.BJC.001.Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Tawar	2.300	Sampel	920.000
7024.BJC.002.Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Tawar	42	Sampel	29.400
7024.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	380	Lembaga	760.000
7024.QEL.U01.Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	57.561	Ekor	2.252.927
7024.QEL.U06.Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	69.669.753	Ekor	24.245.074

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7024.QJC.001.Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	168	Sampel	417.500
7024.QJC.002.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	255	Sampel	510.000
7024.QJC.U03.Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	956	Sampel	899.154
7024.RAL.001.Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	69.495	Unit	2.636.646
7024.RAL.002.Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	107.122	Unit	1.724.656
7024.RAL.003.Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	3.185.430	Unit	962.000
7024.RAL.004.Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	15	Unit	1.500.000
7024.RAL.005.Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	1	Unit	12.000.000
7024.RBQ.001.Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	1	Unit	500.000
7941.ABR.001.Rekomendasi Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya	3	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7941.QAB.001.Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	20	Lembaga	40.000
7941.QDC.001.Rekomendasi bidang lahan budi daya yang akan disertifikasi	1.000	Orang	300.000
7941.QDD.001.Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan	3	Kelompok Masyarakat	750.000
7941.QEA.001.Pembudidaya rumput laut skala kecil yang terlindungi usahanya	42	Orang	125.000
7941.QEA.002.Perindungan usaha budi daya skala kecil	333	Orang	1.000.000
7941.QEO.001.Sarana Budi Daya Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	12	Unit	18.000.000
7941.QEO.002.Sarana Budi Daya Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	50	Unit	12.500.000
7941.QEO.003.Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	440	Unit	105.100.000
7941.RBQ.002.Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	30	Unit	7.500.000
7941.RBQ.003.Prasarana produksi perikanan budi daya di UPT	1	Unit	750.000
032.04.WA.Program Dukungan Manajemen			357.902.464
2348.AEC.001.Kerja Sama Bidang Perikanan Budi Daya	3	Dokumen	2.117.200
2348.EBA.962.Layanan Umum	16	Layanan	3.700.200

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2348.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	6	Layanan	1.850.000
2348.EBA.994.Layanan Perkantoran	16	Layanan	334.836.364
2348.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	458.000
2348.EBA.Z03.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II Ke Bawah)	15	Layanan	279.000
2348.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	350.000
2348.EBB.951.Layanan Sarana Internal	1	Unit	2.000.000
2348.EBC.Z11.Layanan Manajemen SDM Lingkup Kementerian/Lembaga yang Memiliki Satker Vertikal/memiliki UPT di Daerah kategori Kecil	1.527	Layanan	2.593.000
2348.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17	Layanan	3.060.100
2348.EBD.Z25.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke Bawah)	141	Layanan	810.100
2348.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2348.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke Bawah)	17	Layanan	5.340.500
Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)			1.046.983.372
032.05.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			731.009.039
2350.AEB.001.Forum Operasi Pengawasan serta Intelijen Kelautan dan Perikanan	2	Forum	321.669
2350.AFA.001.NSPK bidang operasi Armada pengawasan SDKP	1	NSPK	130.000
2350.AFA.002.NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	2	NSPK	260.000
2350.BHD.001.Operasional Pengawasan dan Logistik Kapal Pengawas	75	Operasi	13.644.059
2350.BHD.003.Operasional Tim Pesawat Patroli	120	Operasi	2.774.138
2350.FAE.001. Laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Laporan	1.016.080
2350.FAE.002.Laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Laporan	1.960.000
2350.QHD.001.Operasi Kapal Pengawas	75	Operasi	421.798.900
2350.QHD.002.Operasi Pesawat Patroli	120	Operasi	117.195.862
2350.QHD.003.Operasi Speedboat Pengawas	20	Operasi	11.200.000
2350.RAL.003.Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	10	Unit	10.000.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2350.RBQ.001.Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	3	Unit	6.800.000
2350.RCG.001.Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	121	Unit	100.000.000
2351.AEA.002.Sinergitas Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Kegiatan	509.500
2351.AEB.001.Forum Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan	3	Forum	945.900
2351.AFA.001.NSPK bidang penanganan pelanggaran	1	NSPK	150.000
2351.BCB.001.Perkara hukum Ditjen PSDKP yang diselesaikan	2	Perkara	200.000
2351.BCE.001.Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	1	Perkara	450.000
2351.BCE.002.Perkara Kelautan yang dikenakan Sanksi Administratif	40	Perkara	2.165.560
2351.BCE.003.Perkara Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif	60	Perkara	2.043.540
2351.BCE.U04.Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	45	Perkara	5.580.000
2351.FAE.001.Laporan supervisi penanganan perkara TPKP	12	Laporan	505.500
2352.ACA.001.Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	2.259	Produk	700.000
2352.AFA.001.NSPK Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1	NSPK	130.000
2352.AFA.002.NSPK Pengawasan Sumber Daya Perikanan	3	NSPK	300.000
2352.BHD.001.Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	15	Operasi	1.524.747
2352.BHD.002.Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	10	Operasi	929.000
2352.BII.001.Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	2	Layanan	484.500
2352.BII.002.Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	14	Layanan	210.000
2352.FAE.001.Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	12	Laporan	1.100.000
2352.FAE.002.Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	12	Laporan	1.033.450
2352.FBA.001.Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)	125.000
2352.FBA.002.Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	375.000
2352.QIC.001.Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	1.409	Lembaga	7.750.068

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2352.QIC.002.Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	1.622	Lembaga	9.107.550
2352.RDS.001.Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1	Unit	3.928.331
2353.BMB.001.Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Kegiatan	480.685
2353.FAE.001.Laporan supervisi pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	12	Laporan	180.000
2353.QDD.001.Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	60	Kelompok Masyarakat	3.000.000
032.05.WA.Program Dukungan Manajemen			315.974.333
2355.AAH.001.Penyusunan Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal	9	Peraturan	297.500
2355.AEC.001.Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Dokumen	550.000
2355.CAN.001.Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	34	Unit	510.000
2355.EBA.962.Layanan Umum	1	Layanan	6.417.800
2355.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	6	Layanan	2.755.455
2355.EBA.994.Layanan Perkantoran	1	Layanan	296.974.333
2355.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	456.640
2355.EBA.Z03.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal	14	Layanan	218.905
2355.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	340.000
2355.EBA.Z07.Layanan BMN Satker Vertikal	14	Layanan	140.000
2355.EBB.951.Layanan Sarana Internal	60	Unit	800.000
2355.EBB.971.Layanan Prasarana Internal	1	Unit	200.000
2355.EBC.996.Layanan Pendidikan dan Pelatihan	196	Orang	1.445.687
2355.EBC.Z13.Layanan Manajemen SDM	1.823	Orang	886.923
2355.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11	Dokumen	2.090.490
2355.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2355.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal	14	Layanan	266.000
2355.EBD.Z31.Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan	197.400

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2355.EBD.Z33.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	120.200
2355.EBD.Z34.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Satker Vertikal	14	Layanan	112.000
2355.EBD.Z35.Layanan Manajemen Kinerja	1	Layanan	211.000
2355.EBD.Z36.Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal	14	Layanan	476.000
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)			276.024.243
032.06.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			157.300.000
2357.BDB.001.Pelaku Pemasaran yang dibina	3.500	Lembaga	7.000.000
2357.PBR.001.Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	5	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000
2357.PBR.003.Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	5	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
2357.PEE.001.Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	20	Kesepakatan	500.000
2357.PEE.002.Kerjasama Pemasaran Rumput Laut	10	Kesepakatan	250.000
2357.PEH.001.Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	200	Promosi	37.000.000
2357.PEH.003.Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	1	Promosi	900.000
2357.PEH.004.Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	2	Promosi	1.300.000
2357.PEH.005.Promosi Produk Rumput Laut Skala Internasional	1	Promosi	650.000
2357.PEH.006.Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan	1	Promosi	700.000
2357.QDI.001.Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	8	Industri	800.000
2357.QDI.002.Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut	2	Industri	200.000
2357.QMA.001.Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	11	Data	1.650.000
2357.QMA.002.Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	11	Data	1.650.000
2358.ADA.001.Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Produk	1.000.000
2358.BMA.002.Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan	6	Data	900.000
2358.QDG.001.Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah	3.020	Umkm	7.550.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2358.QDG.002.Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina	375	Umkm	750.000
2358.QDI.001.Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	650	Industri	1.300.000
5279.ADA.002.Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	100	Produk	1.000.000
5279.ADA.003.Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji	350	Produk	735.000
5279.ADA.004.Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk KP yang disediakan dalam ruang lingkup layanan	15	Produk	315.000
5279.AEF.001.Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	1.500	Orang	450.000
5279.DDA.001.Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan	12	Produk	600.000
5279.QDG.001.UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	100	Umkm	5.000.000
7025.ABR.001. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	4	Rekomendasi Kebijakan	800.000
7025.BDG.001.Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka Penguatan Sistem Logistik	400	Umkm	800.000
7025.BMA.001.Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Data	1.000.000
7025.QDH.001.Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	60	Badan Usaha	900.000
7025.RAL.001.Sarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	5.020	Unit	37.490.000
7025.RAL.002.Sarana Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Pemasaran	550	Unit	11.000.000
7025.RAL.004.Sarana Distribusi Logistik Produk KP	16	Unit	16.999.400
7026.ABR.001.Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha dan Investasi	3	Rekomendasi Kebijakan	900.000
7026.AEE.001.Kemitraan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	10	Kesepakatan	250.000
7026.BAC.001.Pelaku Usaha yang difasilitasi Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran	30	Badan Usaha	300.000
7026.BAC.002.Pelaku Usaha yang didampingi dalam rangka Realisasi Investasi	15	Badan Usaha	300.000
7026.QDB.001. Lembaga Usaha Kelautan Perikanan yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaan Usaha	120	Lembaga	2.310.600
7026.QDG.002.Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina	3.650	Umkm	7.300.000
7026.QDG.003.UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan	750	Umkm	1.500.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
032.06.WA.Program Dukungan Manajemen			118.724.243
2361.AEA.001.Koordinasi Pengelolaan Manajerial	2	Kegiatan	1.516.000
2361.AEC.001.Layanan Kerja Sama Ditjen PDSPKP	3	Kesepakatan	1.382.600
2361.EBA.962.Layanan Umum	2	Layanan	3.712.000
2361.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	750.000
2361.EBA.994.Layanan Perkantoran	2	Layanan	108.524.243
2361.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	458.000
2361.EBA.Z04.Layanan Bantuan Hukum	4	Perkara	200.000
2361.EBB.951.Layanan Sarana Internal Ditjen PDSPKP	1	Paket	50.000
2361.EBC.Z10.Layanan Manajemen SDM	478	Orang	717.000
2361.EBD.Z06.Layanan Barang Milik Negara	1	Layanan	480.000
2361.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan	204.000
2361.EBD.Z25.Layanan Pemantauan dan Evaluasi Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	1	Layanan	6.000
2361.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	508.000
2361.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	1	Layanan	19.000
2361.EBD.Z31.Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan	197.400
Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK)			1.395.428.456
032.07.FD.Program Kualitas Lingkungan Hidup			44.540.000
2362.PBW.001.Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	3	Rekomendasi Kebijakan	550.000
2362.PBW.002.Rekomendasi kebijakan pengelolaan Biota Perairan dan Genetik	4	Rekomendasi Kebijakan	1.700.000
2362.PBW.003.Rekomendasi Peningkatan Luas Kawasan Konservasi	2	Rekomendasi Kebijakan	200.000
2362.PBW.004.Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi	2	Rekomendasi Kebijakan	100.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2362.PBW.005.Rekomendasi Pengelolaan Karbon Biru Berbasis Kinerja	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
s2362.PCA.001.Perizinan Produk Konservasi Ekosistem	2	Produk	450.000
2362.PCA.002.Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	5	Produk	2.625.000
2362.PEE.001.Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	2	Kesepakatan	225.000
2362.PFA.001.Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem	1	NSPK	100.000
2362.PFA.002.Dokumen NSPK Konservasi Biota Perairan	1	NSPK	400.000
2362.RAL.001.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	1	Unit	100.000
2362.RAL.002.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	2	Unit	400.000
2362.REA.002.Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)	19.100.000	Hektar	2.875.000
2362.REA.004.Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	10.000.000	Hektar	30.000.000
2362.REA.005.Terumbu Karang yang direhabilitasi	1	Hektar	100.000
2362.REB.001.Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	25	Spesies	725.000
2362.REB.002.Penanganan Biota Perairan Dilindungi dan atau Terancam punah	12	Spesies	800.000
2362.REB.003.Penanganan Biota Perairan Jenis Asing Invasif	2	Spesies	200.000
2362.REB.004.Penanganan Konflik Biota Perairan	4	Spesies	900.000
2362.SCC.002.Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	25	Orang	200.000
2362.SCC.003.Aparatur Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang ditingkatkan kompetensinya	20	Orang	200.000
2362.SCC.004.Masyarakat Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Orang	300.000
4346.PBW.001.Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
4346.PBW.002.Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
4346.PBW.003.Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut	1	Rekomendasi Kebijakan	200.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
4346.PEE.002.Jejaring, Kemitraan dan Kerjasama Restorasi Kawasan Pesisir	1	Kesepakatan	240.000
4346.QDD.002.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	1	Kelompok Masyarakat	125.000
4346.QDD.003.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	1	Kelompok Masyarakat	125.000
4346.SCC.001.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	100	Orang	400.000
032.07.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.206.460.000
2363.PBW.002.Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi	1	Rekomendasi Kebijakan	200.000
2363.PBW.003.Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	10	Rekomendasi Kebijakan	10.000.000
2363.PBW.004.Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2363.PBW.007.Rekomendasi pengelolaan BMKT	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2363.PBW.008.Rekomendasi Kebijakan Berusaha Sumber Daya Kelautan	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2363.PBW.009.Rekomendasi pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan	1	Rekomendasi Kebijakan	50.000
2363.PEE.002.Jejaring, Kemitraan, Kerjasama Pergaraman	1	Kesepakatan	1.000.000
2363.PFA.002.Dokumen NSPK Sumberdaya Kelautan	3	NSPK	750.000
2363.QDD.001.Korporasi Petambak Garam	3	Kelompok Masyarakat	3.000.000
2363.RBO.002.Revitalisasi Lahan Garam	1.500	Hektar	883.000.000
2363.RBQ.001.Prasarana Usaha Garam	20	Unit	300.000.000
2363.SCC.002.Masyarakat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya	20	Orang	50.000
2363.SCC.003.Masyarakat dan Pengelola BMKT yang Ditingkatkan Kompetensinya	20	Orang	50.000
2363.SCC.004.Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya	100	Orang	2.500.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2365.PBW.001.Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	5	Rekomendasi Kebijakan	400.000
2365.PBW.002.Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1	Rekomendasi Kebijakan	880.000
2365.PFA.002.Dokumen NSPK Pemanfaatan dan Pengendalian Pulau-Pulau Kecil	1	NSPK	380.000
2365.QDD.001.Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	1	Kelompok Masyarakat	150.000
2365.QDD.003.Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1	Kelompok Masyarakat	150.000
7942.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.002.Rekomendasi pengelolaan wisata bahari	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.003.Rekomendasi Pengelolaan bangunan dan instalasi di laut	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.004.Rekomendasi perdagangan karbon sektor kelautan	5	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.005.Rekomendasi Berusaha Jasa Bahari	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PFA.001.Dokumen NSPK Jasa Bahari	1	NSPK	500.000
032.07.WA.Program Dukungan Manajemen			144.428.456
2367.AAH.001.Peraturan Lainnya Ditjen PK	17	Peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	591.064
2367.AEA.001.Koordinasi Pengeloaan Manajerial	5	Kegiatan	1.261.000
2367.AEC.051.Layanan Kerjasama Sub Bidang Pengelolaan Kelautan	5	Kesepakatan	594.874
2367.EBA.962.Layanan Umum	1	Layanan	4.247.897
2367.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	571.327

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2367.EBA.994.Layanan Perkantoran	2	Layanan	132.928.456
2367.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	458.000
2367.EBA.Z03.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	6	Layanan	46.690
2367.EBA.Z06.Layanan BMN untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	421.054
2367.EBA.Z07.Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	8	Layanan	40.000
2367.EBC.Z10.Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga tanpa Satker Vertikal di Daerah dan Tanpa UPT	131	Orang	244.810
2367.EBC.Z11.Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil	504	Orang	466.643
2367.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	7	Rekomendasi	1.344.258
2367.EBD.Z25.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	20	Rekomendasi	104.000
2367.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	508.000
2367.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	4	Layanan	76.000
2367.EBD.Z31.Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	197.400
2367.EBD.Z32.Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	4	Layanan	89.380
2367.EBD.Z35.Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	5	Layanan	237.603
Ditjen Penataan Ruang Laut (DJPRL)			199.960.342
032.08.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			103.610.342
7943.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	2	Rekomendasi Kebijakan	2.462.500
7943.PBW.002.Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	4	Rekomendasi Kebijakan	4.925.000
7943.PBW.004.Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	2	Rekomendasi Kebijakan	2.462.500
7943.PBW.007.Rekomendasi Kebijakan Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	1	Rekomendasi Kebijakan	1.900.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7943.PBW.010.Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
7943.PEE.002.Insiasi Kerja Sama Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	1	Kesepakatan	500.000
7943.PFA.001.Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Perairan	3	Dokumen	1.000.000
7943.PFA.002.Dokumen NSPK Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau kecil	1	Dokumen	500.000
7943.QMA.001.Data dan Informasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional	1	Dokumen	800.000
7943.QMA.002.Data dan Informasi Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	1	Dokumen	300.000
7943.RAL.001.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Nasional	2	Unit	355.224
7943.RAL.002.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	Unit	400.000
7943.SCC.002.Peningkatan Kapasitas SDM Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50	Orang	300.000
7943.UBA.001.Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	7	Daerah	2.086.876
7944.PBT.002.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Berusaha	550	Rekomendasi Kebijakan	3.750.000
7944.PBT.003.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Non Berusaha	55	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
7944.PBT.004.Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Daerah	37	Rekomendasi Kebijakan	15.200.000
7944.PBT.005.Rekomendasi Kebijakan Layanan Prapendaftaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	150	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000
7944.PBT.006.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Data Lapangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	50	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
7944.PBT.010.Rekomendasi Kebijakan Penilaian Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	250	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000
7944.PBT.011.Rekomendasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	50	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000
7944.PFA.001.Dokumen NSPK Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	3	NSPK	1.500.000
7944.RAN.001.Sistem Tata Kelola Pelayanan Perizinan	1	Unit	5.000.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7944.SCC.001.Aparatur Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	Orang	1.500.000
7945.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut KAW	2	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.002.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut KSN	4	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.003.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Perairan Pesisir	5	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.004.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut Nasional	1	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.005.Rekomendasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Perencanaan Ruang Laut	1	Rekomendasi Kebijakan	750.000
7945.PFA.001.Dokumen NSPK Standarisasi Penataan Ruang Laut	2	Dokumen	659.645
7945.QMA.001.Data dan Informasi Publik terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	4	Dokumen	1.200.000
7945.RAL.002.Ocean Monitoring System - LAUTRA	1	Unit	20.000.000
7945.RAN.001.Sistem Monitoring Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut	2	Unit	1.000.000
7945.SCC.001.ASN Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	150	Orang	1.800.000
7945.SCC.002.Stakeholder Kelautan Perikanan (Non ASN) Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	Orang	500.000
7945.SCC.003.Masyarakat Kelautan Perikanan yang Ditingkatkan Kompetensi dalam Pengelolaan Ruang Laut	60	Orang	1.000.000
7946.PBT.001.Rekomendasi Pengendalian KKPRL	1.100	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
7946.PBT.002.Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut	20	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
7946.PBT.005.Rekomendasi Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi	12	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
7946.PBT.006.Rekomendasi Tata Kelola Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Tidak Berizin	17	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7946.PBT.007.Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	8	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7946.PFA.001.Dokumen NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	2	NSPK	508.597
7946.RAL.001.Sarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	20	Unit	500.000
7946.RAN.001.Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	3	Unit	600.000
7946.SCC.001.Aparatur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	150	Orang	600.000
7946.UBA.001.Pemerintah Daerah yang Difasilitasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000
032.08.WA.Program Dukungan Manajemen			96.350.000
7947.AEA.001.Koordinasi Pengelolaan Manajerial	3	Kegiatan	9.801.750
7947.AEC.051.Layanan Kerjasama Sub Bidang Penataan Ruang Laut	5	Kesepakatan	2.000.000
7947.CAN.001.Perangkat Pengolah Data dan Informasi	7	Unit	350.000
7947.EBA.962.Layanan Umum	5	Layanan	13.187.910
7947.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	683.000
7947.EBA.994.Layanan Perkantoran	1	Layanan	60.000.000
7947.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	418.250
7947.EBA.Z06.Layanan BMN	1	Layanan	480.000
7947.EBB.951.Layanan Sarana Internal	46	Unit	6.967.000
7947.EBC.Z11.Layanan Manajemen SDM	368	Orang	1.454.090
7947.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen	500.000
7947.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	508.000
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDMK Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)			1.399.307.765
032.12.DL.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			266.668.436
2375.AAH.111.Peraturan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Disusun	2	Rancangan Peraturan	200.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2375.ABW.121.Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Kajian	100.000
2375.ADF.141.Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan Kelautan dan Perikanan	7	Lembaga	300.000
2375.AEA.151.Koordinasi Pengelolaan Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan	4	Kegiatan	400.000
2375.AEE.152.Kemitraan, Jejaring dan Kerjasama Pelatihan Kelautan dan Perikanan	4	Kesepakatan	200.000
2375.AFA.161.Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan	3	NSPK	300.000
2375.RAL.711.Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	3	Paket	19.679.145
2375.RBQ.721.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	4.551.121
2375.SCC.831.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	23.465	Orang	33.373.103
2376.ABW.121.Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	5	Kajian	400.000
2376.AFA.161.Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan	2	NSPK	100.000
2376.PDE.541.Akreditasi Lembaga dan/atau Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan	19	Lembaga	235.000
2376.PDI.545.Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	52	Orang	235.000
2376.QGC.671.Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan	16	Lembaga	3.000.000
2376.RAA.711.Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	3	Paket	28.446.275
2376.RAN.715.Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	50.000
2376.RBI.721.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	50.000
2376.RBJ.725.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Unit	5.140.032
2376.SAC.811.Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	5.837	Orang	134.765.500
2376.SDC.843.IlmU Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi yang Diterapkan kepada Masyarakat	20	Model	400.000
7020.ABW.128.Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
7020.ABW.129.Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi Kebijakan	50.000
7020.AFA.166.Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	4	NSPK	200.000
7020.DCC.436.Penyuluh Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	50	Orang	50.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7020.QDB.646.Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan	1	Lembaga	150.000
7020.QDD.646.Kelompok Pelaku Usaha/Utama yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	40.100	Kelompok Masyarakat	21.043.260
7020.QKA.696.Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP	1	Laporan	100.000
7020.RAL.716.Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Paket	50.000
7020.RBQ.726.Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	50.000
7020.SDC.846.Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang Diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan	4	Model	750.000
7948.ADF.142.Sertifikasi Kelembagaan Sertifikasi Kompetensi sesuai Standard Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	1	Lembaga	250.000
7948.AFA.162.Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	NSPK	350.000
7948.PAH.512.Standard Kompetensi Profesi yang Disusun Bidang Kelautan dan Perikanan	2	Peraturan	200.000
7948.PDI.542.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	7.500	Orang	10.800.000
7948.RAL.712.Peralatan dan Mesin Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Paket	400.000
7948.RBQ.722.Gedung, Bangunan dan Prasarana Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	200.000
032.12.WA.Program Dukungan Manajemen			1.132.639.329
2378.AEA.952.Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran	4	Kegiatan	610.238
2378.AEA.953.Koordinasi Hukum	6	Kegiatan	500.000
2378.AEA.954.Koordinasi Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	Kegiatan	250.000
2378.AEC.964.Layanan Kerja Sama	1	Layanan	500.000
2378.EBA.962.Layanan Umum	44	Layanan	3.874.493
2378.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	275.000
2378.EBA.994.Layanan Perkantoran	47	Layanan	1.108.526.098
2378.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	458.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
s2378.EBA.Z03.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	17	Layanan	243.793
2378.EBA.Z06.Layanan BMN untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	300.000
2378.EBA.Z07.Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	13	Layanan	124.022
2378.EBB.951.Layanan Sarana Internal	1	Paket	100.000
2378.EBB.971.Layanan Prasarana Internal	1	Unit	100.000
2378.EBC.Z10.Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga yang memiliki Satker Vertikal/memiliki UPT di Daerah Kategori Sedang	216	Orang	81.580
2378.EBC.Z11.Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga tanpa Satker Vertikal di Daerah di daerah Kategori Kecil	23	Orang	90.000
2378.EBC.Z12.Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Sedang	58	Orang	180.000
2378.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	4	Rekomendasi	750.000
2378.EBD.Z25.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	64	Rekomendasi	536.000
2378.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	508.000
2378.EBD.Z27.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	41	Layanan	350.905
2378.EBD.Z33.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	120.200
2378.EBD.Z34.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	8	Layanan	61.000
2378.FAB.461.Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Sistem Informasi	100.000
4345.EBC.Z16.Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	80	Orang	762.900
4345.EBC.Z17.Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (Blended Learning)	80	Orang	766.900
4345.FAC.996.Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	4684	Orang	12.470.200
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)			530.357.165
032.13.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			227.300.000
3989.AFA.001.Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer	1	NSPK	200.000
3989.AFA.002.Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen	1	NSPK	200.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
3989.PDC.001.Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	5.000	Produk	1.750.000
3989.PDC.002.Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	5.000	Produk	7.550.000
3989.PDC.003.Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	95	Produk	200.000
3989.PDF.001.Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	1.500	Lembaga	1.750.000
3989.PDF.002.Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	1.500	Lembaga	4.500.000
3989.QIA.001.Hasil Perikanan di wilayah RI sektor produksi pasca panen yang diawasi mutunya	21	Produk	340.000
3989.QIA.002.Hasil Perikanan di wilayah RI sektor produksi primer yang diawasi mutunya	10	Produk	500.000
3989.QIA.003.hasil perikanan impor yang diawasi mutunya	5	Produk	160.000
3989.QIC.002.Unit usaha produksi pasca panen yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	1.080	Lembaga	550.000
3989.QIC.003.unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	200	Lembaga	200.000
3989.RAL.001.Sarana Pengujian Mutu	46	Unit	147.500.000
3989.RBQ.001.Prasarana Pengujian Mutu	13	Unit	39.700.000
7010.ABR.001.Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7010.AFA.001.NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP	2	NSPK	100.000
7010.BIA.001.Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	35	Produk	350.000
7010.DCC.001.Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	500	Orang	300.000
7010.PBR.001.Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	8	Rekomendasi Kebijakan	1.700.000
7010.PBR.002.Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	20	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000
7010.PDD.001.Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	17	Lembaga	100.000
7010.PDD.002.Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	35	Lembaga	1.600.000
7010.PDD.003.Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	27	Lembaga	400.000
7010.QDC.001.Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	10.000	Orang	15.000.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7010.QIA.001.Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	50	Produk	300.000
032.13.WA.Program Dukungan Manajemen			303.057.165
3987.AEA.001.Koordinasi Pelaksanaan Manejerial	1	Dokumen	3.300.000
3987.AEC.001.Layanan Kerja Sama	6	Kesepakatan	150.000
3987.CAN.001.Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP	47	Unit	2.000.000
3987.EBA.962.Layanan Umum	46	Layanan	16.203.185
3987.EBA.963.Layanan Data dan Informasi	46	Layanan	2.000.000
3987.EBA.994.Layanan Perkantoran	12	Layanan	275.403.980
3987.EBA.Z02.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	100.000
3987.EBA.Z06.Layanan BMN untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Layanan	100.000
3987.EBB.951.Layanan Sarana Internal	3	Unit	2.300.000
3987.EBC.Z11.Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil	1.324	Orang	500.000
3987.EBD.Z24.Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Dokumen	200.000
3987.EBD.Z26.Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Dokumen	500.000
3987.EBD.Z33.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Dokumen	100.000
3987.EBD.Z35.Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L	1	Dokumen	200.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

**RINCIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026**

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.			9.221.625.194
Sekretariat Jenderal (SETJEN)			29.806.731
032.01.WA.Program Dukungan Manajemen			29.806.731
2322.PEC.001.Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	2	Kesepakatan	15.000.000
2329.QMA.001.Layanan Data Kelautan dan Perikanan	160	Data	4.600.000
2329.RAN.001.Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	5.000.000
2329.RAN.002.Sarana Data Citra Satelit Radar	5	Unit	606.731
2329.RCL.001.OM Sarana Data Citra Satelit Radar	3	Unit	4.600.000
Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT)			5.794.493.000
032.03.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			5.794.493.000
2337.PCA.001.Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	500	Produk	500.000
2337.PCA.002.Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	10	Produk	500.000
2337.PDI.001.Awak kapal perikanan yang disertifikasi	500	Orang	500.000
2337.PDI.002.Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	12	Orang	500.000
2337.QDC.001.Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	1.000	Orang	500.000
2337.QEO.002.Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	45.000	Unit	60.085.750
2337.QEO.003.Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	7.500	Unit	461.414.250

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2338.PDI.001.Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	50	Orang	500.000
2338.PDI.002.Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	30	Orang	460.000
2338.QGA.001.Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	1	Lembaga	100.000
2338.QGA.002.Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	50	Lembaga	20.000.000
2338.RAL.001.Sarana penunjang pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang disediakan	9	Unit	200.000
2338.RBQ.001.Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1	Unit	500.000
2338.RBQ.003.Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	2	Unit	60.000.000
2338.RBQ.004.Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - <i>Eco Fishing Port</i>	4	Unit	76.000.000
2338.RBQ.005.Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1	Unit	200.000
2338.SCC.001.Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	50	Orang	33.000
2339.PBR.001.Rekomendasi Kebijakan usaha penangkapan ikan	6	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000
2339.PBR.002.Rekomendasi kebijakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan yang dilaksanakan	6	Rekomendasi Kebijakan	500.000
2339.PCA.001.Perizinan Berusaha (PB) perikanan tangkap yang dikelola	6.000	Produk	700.000
2339.PCA.002.Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU) perikanan tangkap yang dikelola	1.600	Produk	500.000
2339.QDC.001.Nelayan kecil dan pelaku usaha pemilik kapal berukuran di bawah 30 GT yang difasilitasi perizinan berusahnya	5.000	Orang	3.000.000
2339.QKB.001.Usha Penangkapan Ikan yang dipantau, dianalisis dan dievaluasi	6	Laporan	1.000.000
2339.QMA.001.Sistem usaha perikanan tangkap yang terdigitalisasi dan terintegrasi	6	Data	700.000
2339.UBA.001.Pemerintah Daerah yang difasilitasi perizinan berusaha dan pungutan perikanan tangkap	37	Provinsi	1.200.000
2341.PBR.001.Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	11	Rekomendasi Kebijakan	400.000
2341.PBR.002.Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	2	Rekomendasi Kebijakan	150.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2341.PBR.003.Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	11	Rekomendasi Kebijakan	250.000
2341.QGA.001.Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	Lembaga	350.000
2341.QGA.004.Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaanya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	3	Lembaga	1.500.000
2341.RBQ.002.Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	1	Unit	100.000
7940.QDC.001.Nelayan yang difasilitasi sertifikasi bidang tanahnya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDC.002.Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDC.003.Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	2.500	Orang	1.500.000
7940.QDD.001.Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	250	Kelompok Masyarakat	16.500.000
7940.QDD.004.Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (Korporasi)	1	Kelompok Masyarakat	200.000
7940.QDD.005.Koperasi nelayan yang difasilitasi tergabung dalam koperasi merah putih Kelautan dan Perikanan	250	Kelompok Masyarakat	6.250.000
7940.QEA.001.Bantuan Premi Asuransi Nelayan	275.000	Orang	61.600.000
7940.QEH.001.Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya	250	Kelompok Masyarakat	5.002.000.000
7940.QEH.002.Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (Korporasi)	1	Kelompok Masyarakat	200.000
7940.QEH.005.Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	3	Kelompok Masyarakat	3.500.000
7940.QKA.001.Nelayan kecil yang dipantau pemberdayaan usahanya	200	Laporan	1.000.000
7940.QKA.002.Kelompok nelayan yang dipantau pemberdayaan usahanya	800	Laporan	1.000.000
7940.QKA.003.Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	10.000	Laporan	200.000
7940.QKA.004.Kelompok Nelayan yang diidentifikasi kampung nelayannya untuk difasilitasi penataannya	20	Laporan	200.000
7940.QMA.001.Data Nelayan yang teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan	100.000	Data	3.750.000
Ditjen Perikanan Budi Daya (DJPB)			759.955.974
032.04.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			759.955.974
7021.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut	20	Lembaga	40.000
7022.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau	380	Lembaga	760.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7022.QEL.U01.Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	204	Ekor	22.236
7022.QEL.U02.Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	19.162	Ekor	1.124.837
7022.QEL.U03.Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	7.619.248	Ekor	1.904.812
7022.QEL.U04.Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	102.973.095	Ekor	5.456.471
7022.QJC.001.Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji	480	Sampel	1.200.000
7022.QJC.002.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji	255	Sampel	510.000
7022.QJC.U03.Sampel Surveilance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji	535	Sampel	502.856
7022.RAL.001.Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	4.042	Unit	412.328
7022.RAL.002.Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi	141.198	Unit	8.189.502
7022.RAL.003.Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	106.102	Unit	1.538.482
7022.RAL.004.Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	32.339.991	Unit	7.276.498
7022.RAL.005.Benih Udang yang Diproduksi	52.450.560	Unit	2.622.528
7022.RAL.006.Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi	3.883.078	Unit	112.609.254
7022.RBQ.003. <i>Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)</i>	7	Unit	60.000.000
7022.RBQ.005.Budi Daya Udang Terintegrasi - ISF	1	Unit	10.000.000
7022.RBQ.006.Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan	1	Unit	300.000.000
7022.RBQ.007.Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun	4	Unit	10.000.000
7023.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut	200	Lembaga	400.000
7023.QEL.U03.Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	448.658	Ekor	460.772
7023.QEL.U04.Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	4.560.469	Ekor	27.932.871
7023.QJC.001.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	340	Sampel	680.000
7023.QJC.U02.Sampel <i>Surveillance</i> Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	216	Sampel	203.343
7023.RAL.001.Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	5.747	Unit	811.348
7023.RAL.002.Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	5.612	Unit	1.840.635
7023.RAL.004.Benih Kepiting yang diproduksi	341.622	Unit	341.622
7023.RAL.005.Benih Ikan Laut yang diproduksi	773.771	Unit	4.642.622
7023.RAL.006.Ikan Konsumsi air laut hasil budi daya yang diproduksi	25.000	Unit	3.750.000
7023.RBQ.001.Kluster Komoditas Unggulan Air Laut berbasis kawasan	1	Unit	250.000
7024.QAB.001.Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air tawar	380	Lembaga	760.000
7024.QEL.U01.Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	57.561	Ekor	2.252.927
7024.QEL.U06.Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	69.669.753	Ekor	24.245.074
7024.QJC.001.Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	168	Sampel	417.500
7024.QJC.002.Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	255	Sampel	510.000
7024.QJC.U03.Sampel Surveilance Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	956	Sampel	899.154
7024.RAL.001.Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	69.495	Unit	2.636.646

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7024.RAL.002.Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	107.122	Unit	1.724.656
7024.RAL.003.Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	3.185.430	Unit	962.000
7024.RAL.004.Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	15	Unit	1.500.000
7024.RAL.005.Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	1	Unit	12.000.000
7024.RBQ.001.Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	1	Unit	500.000
7941.QAB.001.Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	20	Lembaga	40.000
7941.QDC.001.Rekomendasi bidang lahan budi daya yang akan disertifikasi	1.000	Orang	300.000
7941.QDD.001.Korporasi Pembudidaya ikan yang dikembangkan	3	Kelompok Masyarakat	750.000
7941.QEA.001.Pembudidaya rumput laut skala kecil yang terlindungi usahanya	42	Orang	125.000
7941.QEA.002.Perindungan usaha budi daya skala kecil	333	Orang	1.000.000
7941.QEO.001.Sarana Budi Daya Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	12	Unit	18.000.000
7941.QEO.002.Sarana Budi Daya Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	50	Unit	12.500.000
7941.QEO.003.Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	440	Unit	105.100.000
7941.RBQ.002.Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	30	Unit	7.500.000
7941.RBQ.003.Prasarana produksi perikanan budi daya di UPT	1	Unit	750.000
Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)			690.780.711
032.05.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			690.780.711
2350.QHD.001.Operasi Kapal Pengawas	75	Operasi	421.798.900
2350.QHD.002.Operasi Pesawat Patroli	120	Operasi	117.195.862
2350.QHD.003.Operasi Speedboat Pengawas	20	Operasi	11.200.000
2350.RAL.003.Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	10	Unit	10.000.000
2350.RBQ.001.Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	3	Unit	6.800.000
2350.RCG.001.Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	121	Unit	100.000.000
2352.QIC.001.Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	1.409	Lembaga	7.750.068
2352.QIC.002.Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	1.622	Lembaga	9.107.550
2352.RDS.001.Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1	Unit	3.928.331
2353.QDD.001. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	60	Kelompok Masyarakat	3.000.000
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)			103.500.000
032.06.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			103.500.000
2357.PBR.001.Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	5	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2357.PBR.003.Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	5	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
2357.PEE.001.Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	20	Kesepakatan	500.000
2357.PEH.003.Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	1	Promosi	900.000
2357.PEH.004.Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	2	Promosi	1.300.000
2357.PEH.005.Promosi Produk Rumput Laut Skala Internasional	1	Promosi	650.000
2357.PEH.006.Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan	1	Promosi	700.000
2357.QDI.001.Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	8	Industri	800.000
2357.QMA.001.Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	11	Data	1.650.000
2357.QMA.002.Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	11	Data	1.650.000
2358.QDG.001.Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah	3.020	Ukm	7.550.000
2358.QDG.002.Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina	375	Ukm	750.000
2358.QDI.001.Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	650	Industri	1.300.000
5279.QDG.001.UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	100	Ukm	5.000.000
7025.QDH.001.Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	60	Badan Usaha	900.000
7025.RAL.001.Sarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	5.020	Unit	37.490.000
7025.RAL.002.Sarana Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Pemasaran	550	Unit	11.000.000
7025.RAL.004.Sarana Distribusi Logistik Produk KP	16	Unit	16.999.400
7026.QDB.001. Lembaga Usaha Kelautan Perikanan yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaan Usaha	120	Lembaga	2.310.600
7026.QDG.002.Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina	3.650	Ukm	7.300.000
7026.QDG.003.UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan	750	UMKM	1.500.000
Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK)			1.249.910.000
032.07.FD.Program Kualitas Lingkungan Hidup			43.750.000
2362.PBW.001.Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	3	Rekomendasi Kebijakan	550.000
2362.PBW.002.Rekomendasi kebijakan pengelolaan Biota Perairan dan Genetik	4	Rekomendasi Kebijakan	1.700.000
2362.PBW.003.Rekomendasi Peningkatan Luas Kawasan Konservasi	2	Rekomendasi Kebijakan	200.000
2362.PBW.004.Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi	2	Rekomendasi Kebijakan	100.000
2362.PBW.005.Rekomendasi Pengelolaan Karbon Biru Berbasis Kinerja	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2362.PCA.001.Perizinan Produk Konservasi Ekosistem	2	Produk	450.000
2362.PCA.002.Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	5	Produk	2.625.000
2362.PEE.001.Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	2	Kesepakatan	225.000
2362.PFA.001.Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem	1	NSPK	100.000
2362.PFA.002.Dokumen NSPK Konservasi Biota Perairan	1	NSPK	400.000
2362.RAL.001.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	1	Unit	100.000
2362.RAL.002.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	2	Unit	400.000
2362.REA.002.Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)	19.100.000	Hektar	2.875.000
2362.REA.004.Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	10.000.000	Hektar	30.000.000
2362.REA.005.Terumbu Karang yang direhabilitasi	1	Hektar	100.000
2362.REB.001.Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	25	Spesies	725.000
2362.REB.002.Penanganan Biota Perairan Dilindungi dan atau Terancam punah	12	Spesies	800.000
2362.REB.003.Penanganan Biota Perairan Jenis Asing Invasif	2	Spesies	200.000
2362.REB.004.Penanganan Konflik Biota Perairan	4	Spesies	900.000
2362.SCC.002.Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	25	Orang	200.000
2362.SCC.003.Aparatur Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang ditingkatkan kompetensinya	20	Orang	200.000
2362.SCC.004.Masyarakat Pengelola Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Spesies dan Genetik yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Orang	300.000
4346.PBW.002.Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
4346.SCC.001.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	100	Orang	400.000
032.07.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.206.160.000
2363.PBW.002.Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi	1	Rekomendasi Kebijakan	200.000
2363.PBW.003.Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	10	Rekomendasi Kebijakan	10.000.000
2363.PBW.004.Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2363.PBW.007.Rekomendasi pengelolaan BMKT	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
2363.PBW.008.Rekomendasi Kebijakan Berusaha Sumber Daya Kelautan	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
2363.PBW.009.Rekomendasi pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan	1	Rekomendasi Kebijakan	50.000
2363.PEE.002.Jejaring, Kemitraan, Kerjasama Pergaraman	1	Kesepakatan	1.000.000
2363.PFA.002.Dokumen NSPK Sumberdaya Kelautan	3	NSPK	750.000
2363.QDD.001.Korporasi Petambak Garam	3	Kelompok Masyarakat	3.000.000
2363.RBO.002.Revitalisasi Lahan Garam	1.500	Hektar	883.000.000
2363.RBQ.001.Prasarana Usaha Garam	20	Unit	300.000.000
2363.SCC.002.Masyarakat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya	20	Orang	50.000
2363.SCC.003.Masyarakat dan Pengelola BMKT yang Ditingkatkan Kompetensinya	20	Orang	50.000
2363.SCC.004.Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya	100	Orang	2.500.000
2365.PBW.001.Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	5	Rekomendasi Kebijakan	400.000
2365.PBW.002.Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1	Rekomendasi Kebijakan	880.000
2365.PFA.002.Dokumen NSPK Pemanfaatan dan Pengendalian Pulau-Pulau Kecil	1	NSPK	380.000
7942.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.002.Rekomendasi pengelolaan wisata bahari	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.003.Rekomendasi Pengelolaan bangunan dan instalasi di laut	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.004.Rekomendasi perdagangan karbon sektor kelautan	5	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PBW.005.Rekomendasi Berusaha Jasa Bahari	3	Rekomendasi Kebijakan	500.000
7942.PFA.001.Dokumen NSPK Jasa Bahari	1	NSPK	500.000
Ditjen Pentaan Ruang Laut (DJPRL)			103.610.342
032.08.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			103.610.342
7943.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	2	Rekomendasi Kebijakan	2.462.500
7943.PBW.002.Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	4	Rekomendasi Kebijakan	4.925.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7943.PBW.004.Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	2	Rekomendasi Kebijakan	2.462.500
7943.PBW.007.Rekomendasi Kebijakan Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	1	Rekomendasi Kebijakan	1.900.000
7943.PBW.010.Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
7943.PEE.002.Insiasi Kerja Sama Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	1	Kesepakatan	500.000
7943.PFA.001.Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Perairan	3	NSPK	1.000.000
7943.PFA.002.Dokumen NSPK Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau kecil	1	NSPK	500.000
7943.QMA.001.Data dan Informasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional	1	Dokumen	800.000
7943.QMA.002.Data dan Informasi Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	1	Dokumen	300.000
7943.RAL.001.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Nasional	2	Unit	355.224
7943.RAL.002.Sarana Pendukung Penyelenggaraan Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	Unit	400.000
7943.SCC.002.Peningkatan Kapasitas SDM Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50	Orang	300.000
7943.UBA.001.Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	7	Provinsi	2.086.876
7944.PBT.002.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Berusaha	550	Rekomendasi Kebijakan	3.750.000
7944.PBT.003.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Non Berusaha	55	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
7944.PBT.004.Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Daerah	37	Rekomendasi Kebijakan	15.200.000
7944.PBT.005.Rekomendasi Kebijakan Layanan Prapendaftaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	150	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000
7944.PBT.006.Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Data Lapangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	50	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
7944.PBT.010.Rekomendasi Kebijakan Penilaian Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	250	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000
7944.PBT.011.Rekomendasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	50	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000
7944.PFA.001.Dokumen NSPK Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	3	NSPK	1.500.000
7944.RAN.001.Sistem Tata Kelola Pelayanan Perizinan	1	Unit	5.000.000
7944.SCC.001.Aparatur Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	Orang	1.500.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
7945.PBW.001.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut KAW	2	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.002.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut KSN	4	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.003.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Perairan Pesisir	5	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.004.Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut Nasional	1	Rekomendasi Kebijakan	250.000
7945.PBW.005.Rekomendasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Perencanaan Ruang Laut	1	Rekomendasi Kebijakan	750.000
7945.PFA.001.Dokumen NSPK Standarisasi Penataan Ruang Laut	2	NSPK	659.645
7945.QMA.001.Data dan Informasi Publik terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	4	Dokumen	1.200.000
7945.RAL.002.Ocean Monitoring System - LAUTRA	1	Unit	20.000.000
7945.RAN.001.Sistem Monitoring Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut	2	Unit	1.000.000
7945.SCC.001.ASN Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	150	Orang	1.800.000
7945.SCC.002.Stakeholder Kelautan Perikanan (Non ASN) Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	Orang	500.000
7945.SCC.003.Masyarakat Kelautan Perikanan yang Ditingkatkan Kompetensi dalam Pengelolaan Ruang Laut	60	Orang	1.000.000
7946.PBT.001.Rekomendasi Pengendalian KKPRL	1.100	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
7946.PBT.002.Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut	20	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
7946.PBT.005.Rekomendasi Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi	12	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
7946.PBT.006.Rekomendasi Tata Kelola Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Tidak Berizin	17	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
7946.PBT.007.Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	8	Rekomendasi Kebijakan	600.000
7946.PFA.001.Dokumen NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	2	NSPK	508.597
7946.RAL.001.Sarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	20	Unit	500.000
7946.RAN.001.Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	3	Unit	600.000
7946.SCC.001.Aparatur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	150	Orang	600.000
7946.UBA.001.Pemerintah Daerah yang Difasilitasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)			263.668.436
032.12.DL.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			263.668.436
2375.RAL.711.Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	3	Paket	19.679.145
2375.RBQ.721.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	4.551.121
2375.SCC.831. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	23.465	Orang	33.373.103
2376.PDE.541.Akreditasi Lembaga dan/atau Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan	19	Lembaga	235.000
2376.PDI.545.Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	52	Orang	235.000
2376.QGC.671.Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan	16	Lembaga	3.000.000
2376.RAA.711.Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	3	Paket	28.446.275
2376.RAN.715.Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Paket	50.000
2376.RBI.721.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	50.000
2376.RBJ.725.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Unit	5.140.032
2376.SAC.811.Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	5.837	Orang	134.765.500
2376.SDC.843.IlmU Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi yang Diterapkan kepada Masyarakat	20	Model	400.000
7020.QDB.646.Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan	1	Lembaga	150.000
7020.QDD.646.Kelompok Pelaku Usaha/Utama yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	40.100	Kelompok Masyarakat	21.043.260
7020.QKA.696.Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP	1	Laporan	100.000
7020.RAL.716.Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Paket	50.000
7020.RBQ.726.Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	50.000
7020.SDC.846.Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang Diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan	4	Model	750.000
7948.PAH.512.Standard Kompetensi Profesi yang Disusun Bidang Kelautan dan Perikanan	2	Peraturan	200.000
7948.PDI.542.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	7.500	Orang	10.800.000
7948.RAL.712.Peralatan dan Mesin Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Paket	400.000
7948.RBQ.722.Gedung, Bangunan dan Prasarana Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Unit	200.000
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)			225.900.000
032.13.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			225.900.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
3989.PDC.001.Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	5.000	Produk	1.750.000
3989.PDC.002.Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	5.000	Produk	7.550.000
3989.PDC.003.Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	95	Produk	200.000
3989.PDF.001.Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	1.500	Lembaga	1.750.000
3989.PDF.002.Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	1.500	Lembaga	4.500.000
3989.QIA.001.Hasil Perikanan di wilayah RI sektor produksi pasca panen yang diawasi mutunya	21	Produk	340.000
3989.QIA.002.Hasil Perikanan di wilayah RI sektor produksi primer yang diawasi mutunya	10	Produk	500.000
3989.QIA.003.hasil perikanan impor yang diawasi mutunya	5	Produk	160.000
3989.QIC.002.Unit usaha produksi pasca panen yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	1.080	Lembaga	550.000
3989.QIC.003.unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	200	Lembaga	200.000
3989.RAL.001.Sarana Pengujian Mutu	46	Unit	147.500.000
3989.RBQ.001.Prasarana Pengujian Mutu	13	Unit	39.700.000
7010.PBR.001.Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	39	Rekomendasi Kebijakan	1.700.000
7010.PBR.002.Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	15	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000
7010.PDD.001.Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1	Lembaga	100.000
7010.PDD.002.Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	40	Lembaga	1.600.000
7010.PDD.003.Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	27	Lembaga	400.000
7010.QDC.001.Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	1.000	Orang	15.000.000
7010.QIA.001.Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	10	Produk	300.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.			37.000.000
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)			37.000.000
032.06.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			37.000.000
2357.PEH.001.Kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)	200	Promosi	37.000.000
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.			29.950.000
Ditjen Perikanan Budi Daya (DJPB)			29.500.000
032.04.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			29.500.000
7021.QED.001.Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	62.231	Unit	4.500.000
7021.QEG.001.Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	200	Unit	10.000.000
7021.QEG.002.Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i>	1	Unit	5.000.000
7021.RBQ.002.Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun	1	Unit	10.000.000
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)			450.000
032.06.EC.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			450.000
2357.PEE.002.Kerjasama Pemasaran Rumput Laut	10	Kesepakatan	250.000
2357.QDI.002.Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut	2	Industri	200.000
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			1.090.000
Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK)			1.090.000
032.07.FD.Program Kualitas Lingkungan Hidup			790.000

UKE I/Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)
4346.PBW.001.Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
4346.PBW.003.Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut	1	Rekomendasi Kebijakan	200.000
4346.PEE.002.Jejaring, Kemitraan dan Kerjasama Restorasi Kawasan Pesisir	1	Kesepakatan	240.000
4346.QDD.002.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	1	Kelompok Masyarakat	125.000
4346.QDD.003.Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	1	Kelompok Masyarakat	125.000
032.07.HB.Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			300.000
2365.QDD.001.Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	1	Kelompok Masyarakat	150.000
2365.QDD.003.Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1	Kelompok Masyarakat	150.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO